



SEKRETARIAT

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-3912812

Faks : 021-3912-511 dan 021-391-2513

E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id

Website : www.wapresri.go.id



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI RIAU



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI RIAU



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI RIAU**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Judul: Indikator Kesejahteraan Daerah
Provinsi Riau**

Disusun dan Diterbitkan oleh:
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Pertama, November 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
© 2011 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Foto Cover: maricogria.com, kmw1riau.blogspot.com

Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3912812
Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513
E-mail: sekretariat@tnp2k.go.id
Website: www.wapresri.go.id



DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
APK	: Angka Partispasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFSI	: <i>Composite Food Security Index</i>
DKP	: Dewan Ketahanan Pangan
FIA	: <i>Food Insecurity Atlas</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
NTP	: Nilai Tukar Petani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
WFP	: <i>World Food Programme</i>



DAFTAR ISI

Daftar Singkatan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vi
Pertumbuhan Ekonomi.....	1
Inflasi.....	4
Nilai Tukar Petani.....	5
Tingkat Kemiskinan	6
Indikator Kemiskinan	7
Program Penanggulangan Kemiskinan	8
Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan.....	9
Bidang Kesehatan	11
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.....	15
Bidang Pendidikan.....	17
Akses Terhadap Air Bersih	19
Akses Terhadap Sanitasi.....	20
Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Komponen Indeks Pembangunan Manusia	22
Ketahanan Pangan.....	23
Prioritas Bidang Pendidikan	26
Prioritas Bidang Kesehatan.....	28
Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	31
Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	34
Bidang-Bidang Prioritas Kesejahteraan Rakyat	35
PNPM Mandiri.....	36
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	38
Anggaran Pembangunan Daerah	41

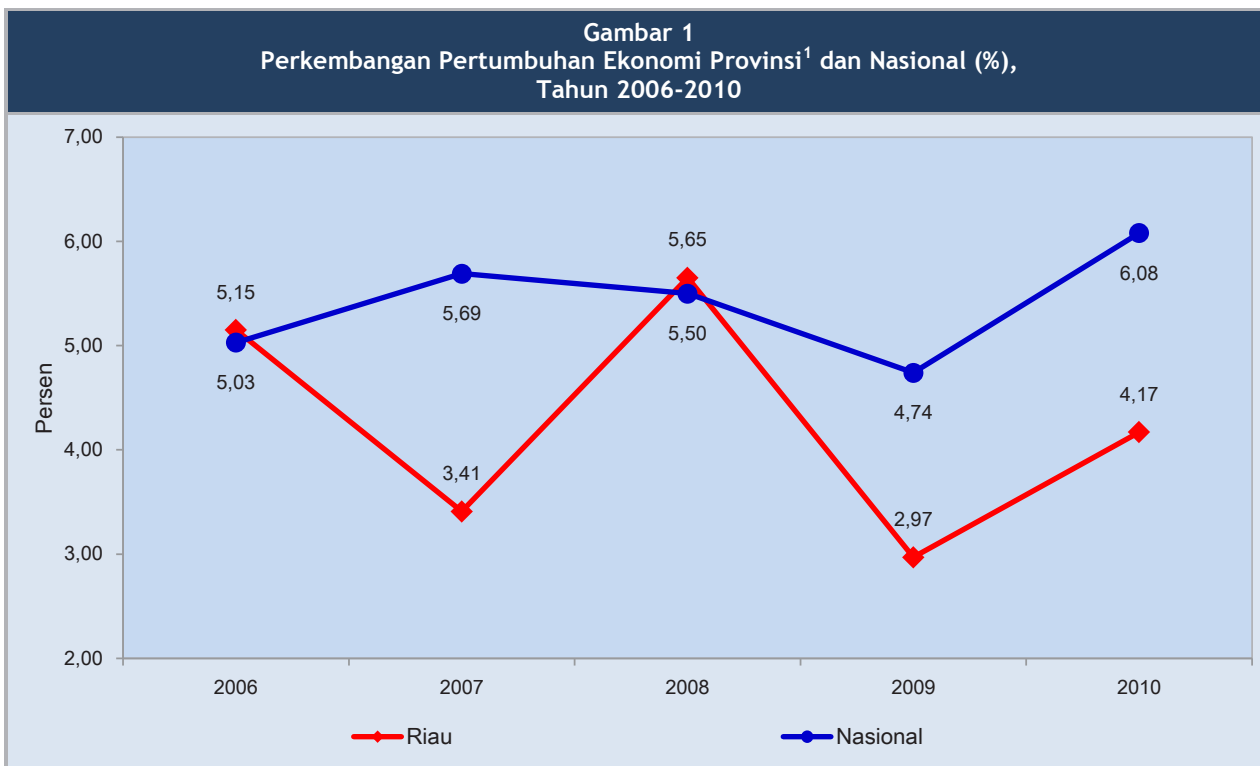


DAFTAR GAMBAR

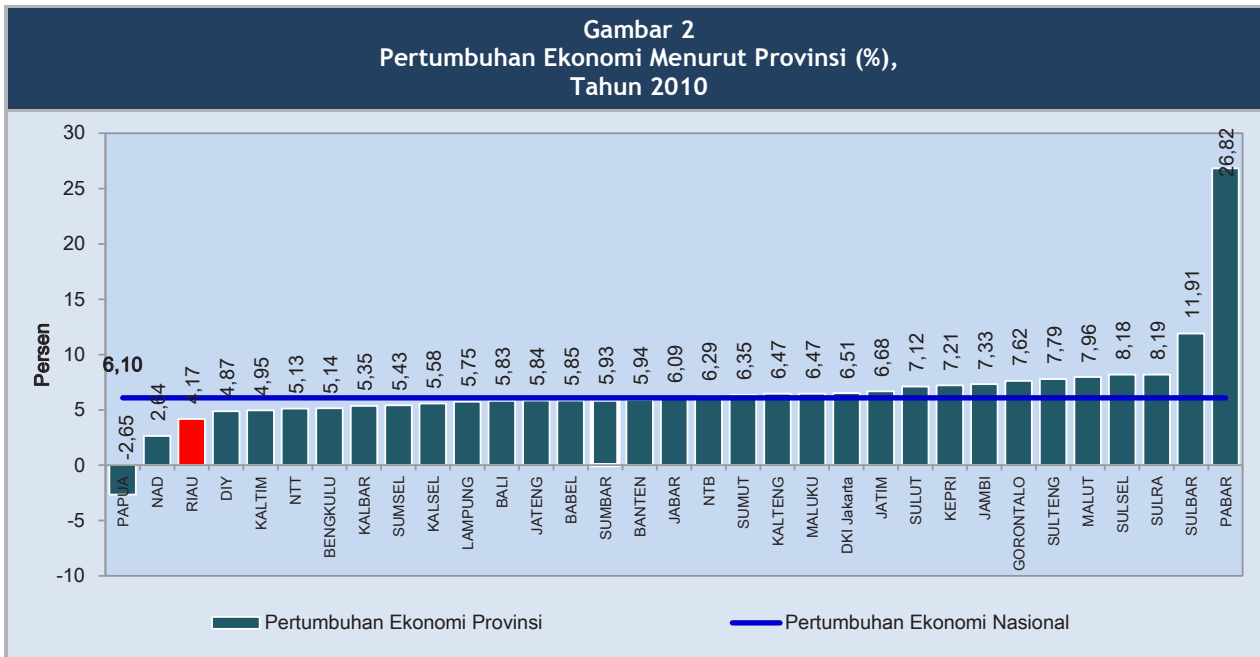
- Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional (%), Tahun 2006-2010
- Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 3. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 4. Perkembangan Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Riau (%), Tahun 2010-2011
- Gambar 5. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%), (Bulan Juli 2011)
- Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani (Year-on-Year) Provinsi Riau, Tahun 2008-2011
- Gambar 7. Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011
- Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 10. Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota
- Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 13. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 14. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007
- Gambar 15. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 16. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 17. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 18. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 19. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009
- Gambar 20. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 21. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 22. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 24. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 25. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2009

- Gambar 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 28. Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Sereal per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 29. Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 30. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun
- Gambar 31. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)
- Gambar 32. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama
- Gambar 33. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi
- Gambar 34. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
- Gambar 35. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih
- Gambar 36. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi
- Gambar 37. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik
- Gambar 38. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja
- Gambar 39. Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Riau, Tahun 2011
- Gambar 40. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Riau, 2010 - 2011
- Gambar 41. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011
- Gambar 42. Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 43. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 44. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 45. Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Riau (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 46. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Riau (Juta Rupiah), Tahun 2010
- Gambar 47. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Riau, Tahun 2010

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

¹ Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merupakan angka sementara dan tahun 2010 merupakan angka sangat sementara.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 1.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 - 2009

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)		PDRB Atas Dasar Harga Konstan ADHK 2000 (Triliun Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 (Persen)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Pertanian	53,14	60,67	15,49	16,06	4,79	3,64
Pertambangan Dan Penggalian	123,78	134,32	46,90	46,89	3,93	(0,02)
Industri Pengolahan	50,18	61,74	9,91	10,39	7,18	4,87
Listrik, Gas & Air Bersih	0,46	0,52	0,20	0,20	6,86	3,03
Bangunan	11,31	14,73	2,97	3,23	11,14	8,62
Perdagangan, Hotel & Restoran	19,32	24,83	7,50	8,16	9,72	8,72
Pengangkutan & Komunikasi	4,87	5,75	2,58	2,78	10,45	8,11
Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,07	6,63	1,15	1,26	13,65	9,99
Jasa - Jasa	8,28	10,31	4,38	4,75	9,25	8,39
Produk Domestik Regional Bruto	276,40	319,51	91,09	93,73	5,65	2,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 2.
Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008-2010 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010
	Agustus	Agustus	Agustus
Pertanian	49,3	48,4	44,6
Pertambangan	2,36	2,1	1,5
Industri	5,28	5,8	5,8
Listrik, gas, dan air Bersih	0,35	0,5	0,3
Bangunan	5,18	4,8	5,7
Perdagangan	17,58	18,2	18,8
Angkutan dan pergudangan	5,6	4,8	4,7
Kuangan dan jasa perusahaan	0,86	1,5	1,4
Jasa kemasyarakatan	13,5	13,9	17,1

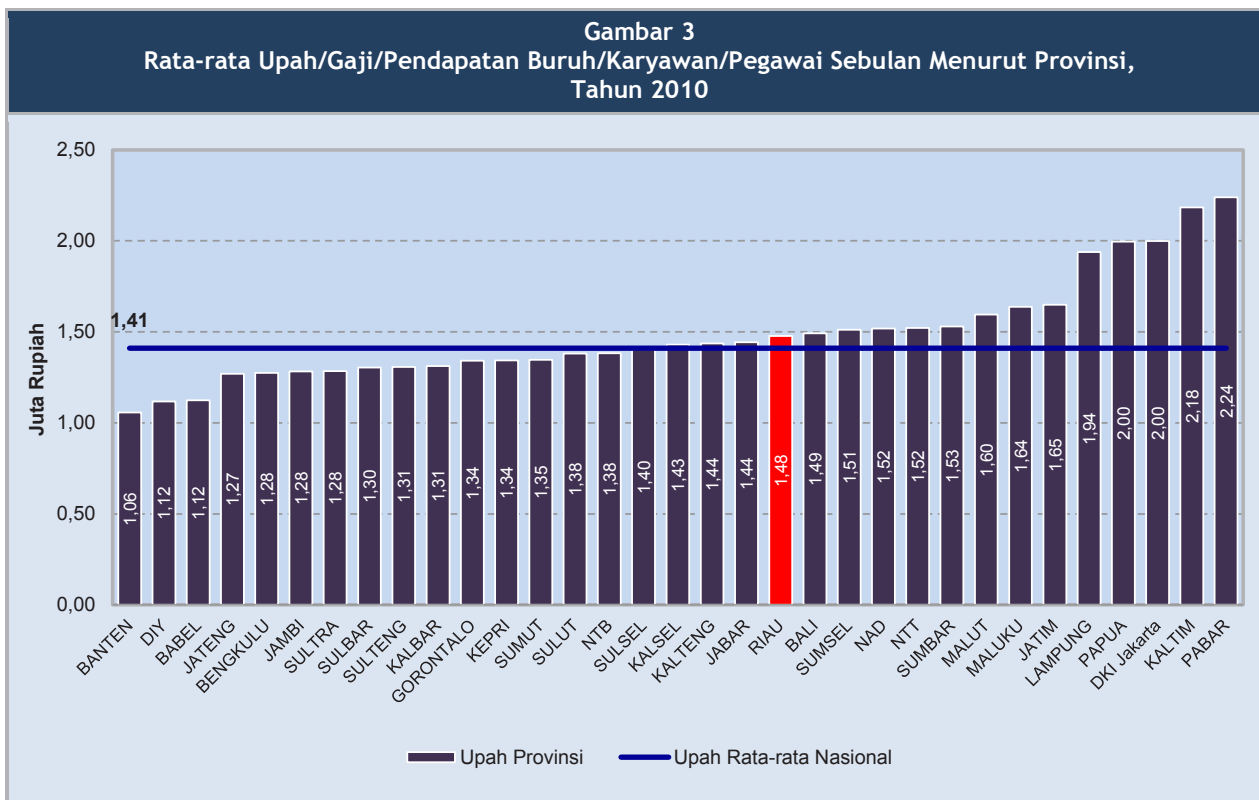
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 3.
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2009 (Persen)

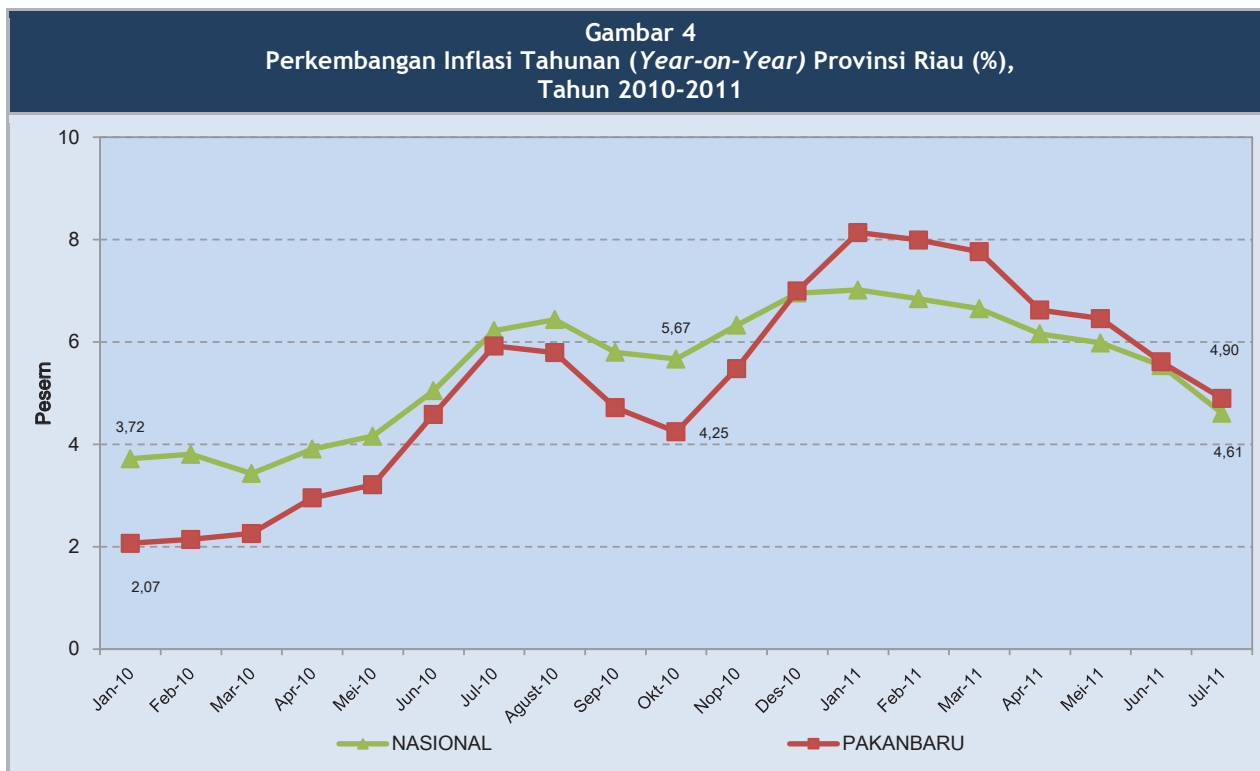
LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB (ADHK 2000)		Distribusi Tenaga Kerja	
	2008	2009	2008	2009
Pertanian	17,01	17,13	49,3	48,4
Pertambangan	51,49	50,02	2,36	2,1
Industri	10,88	11,09	5,28	5,8
Listrik, Gas, Dan Air Bersih	0,22	0,22	0,35	0,5
Bangunan	3,26	3,45	5,18	4,8
Perdagangan	8,24	8,71	17,58	18,2
Angkutan Dan Pergudangan	2,83	2,97	5,6	4,8
Keuangan Dan Jasa Perusahaan	1,26	1,35	0,86	1,5
Jasa Kemasyarakatan	4,81	5,07	13,5	13,9

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

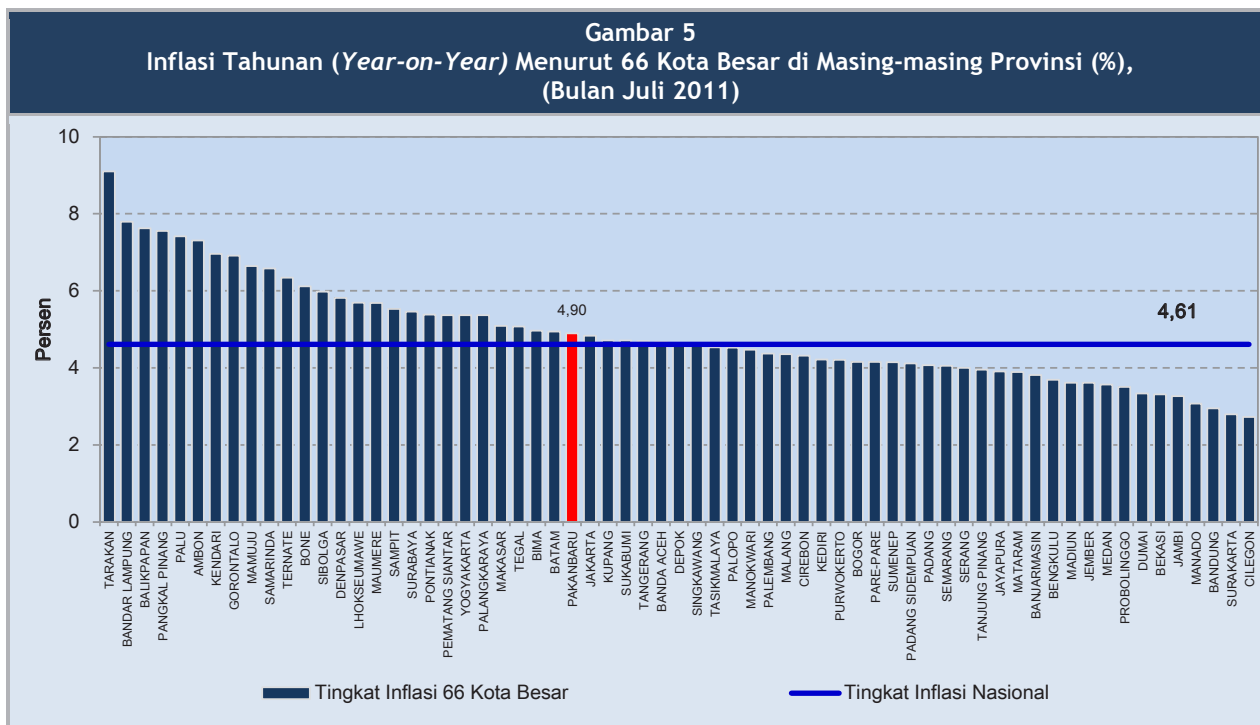


Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS 2011

INFLASI

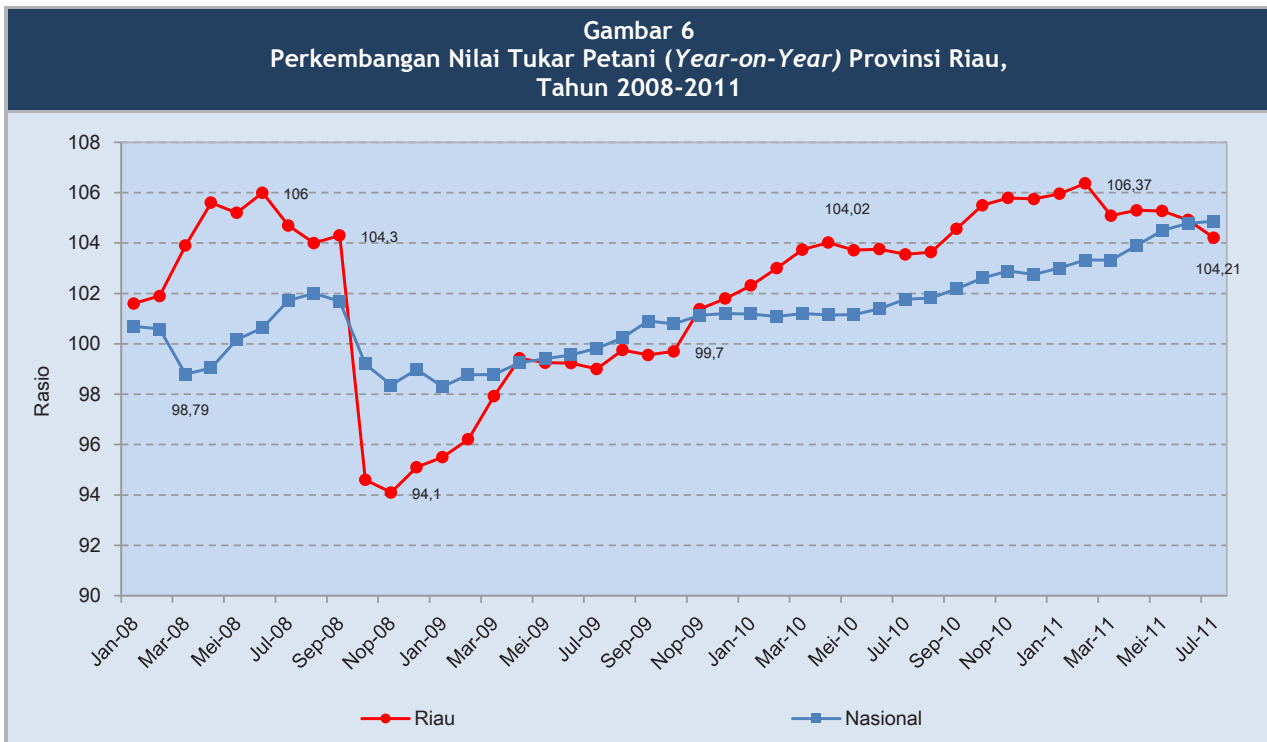


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

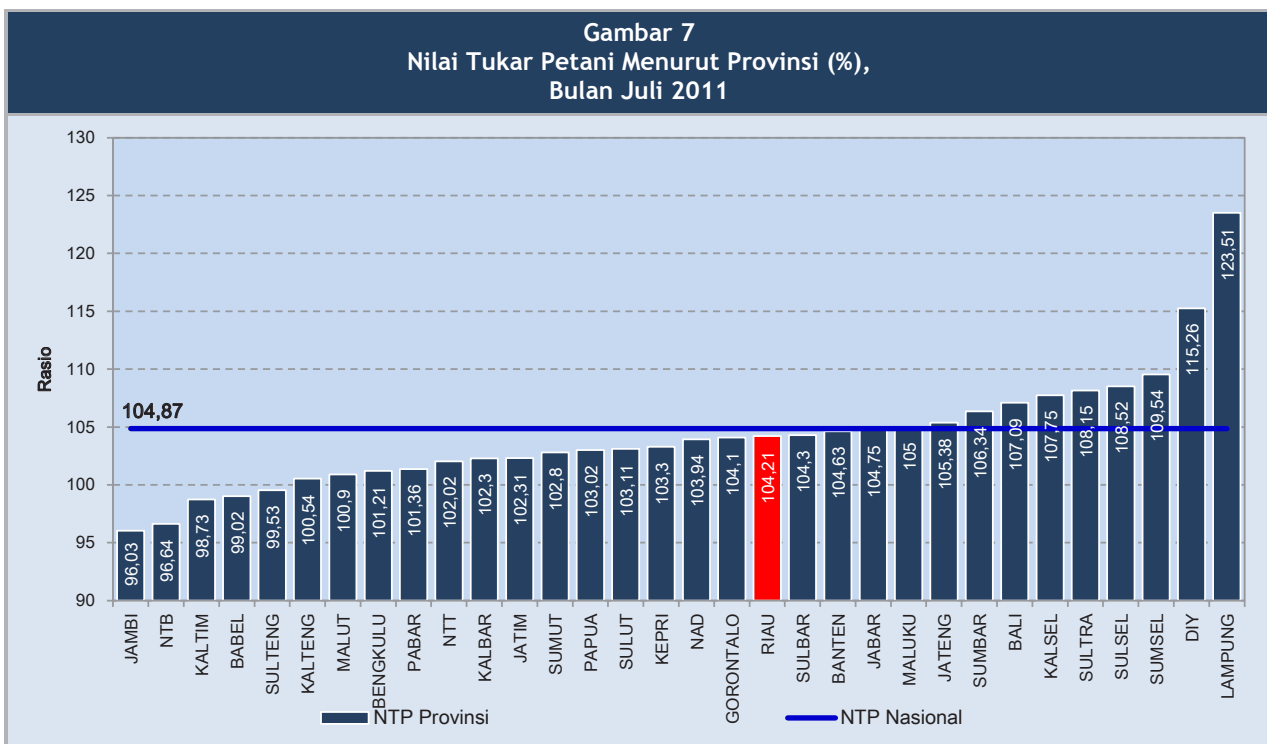


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

NILAI TUKAR PETANI

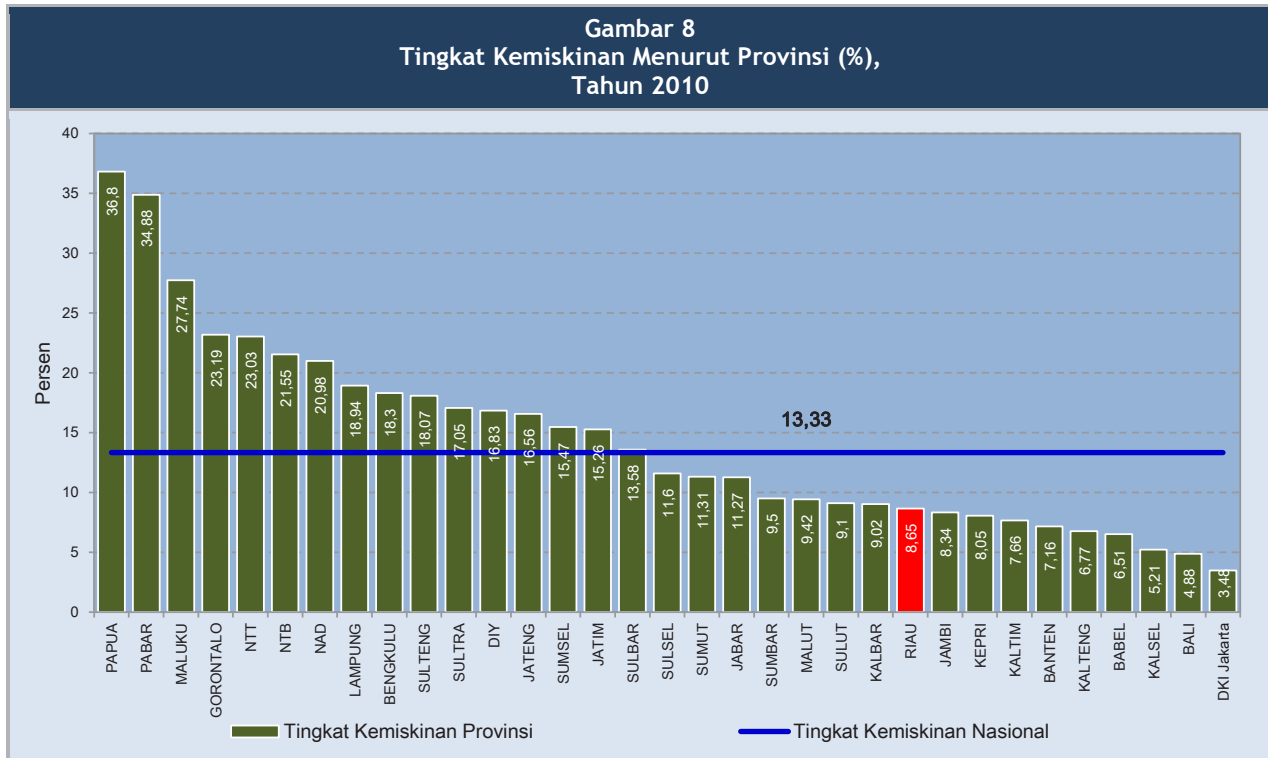


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

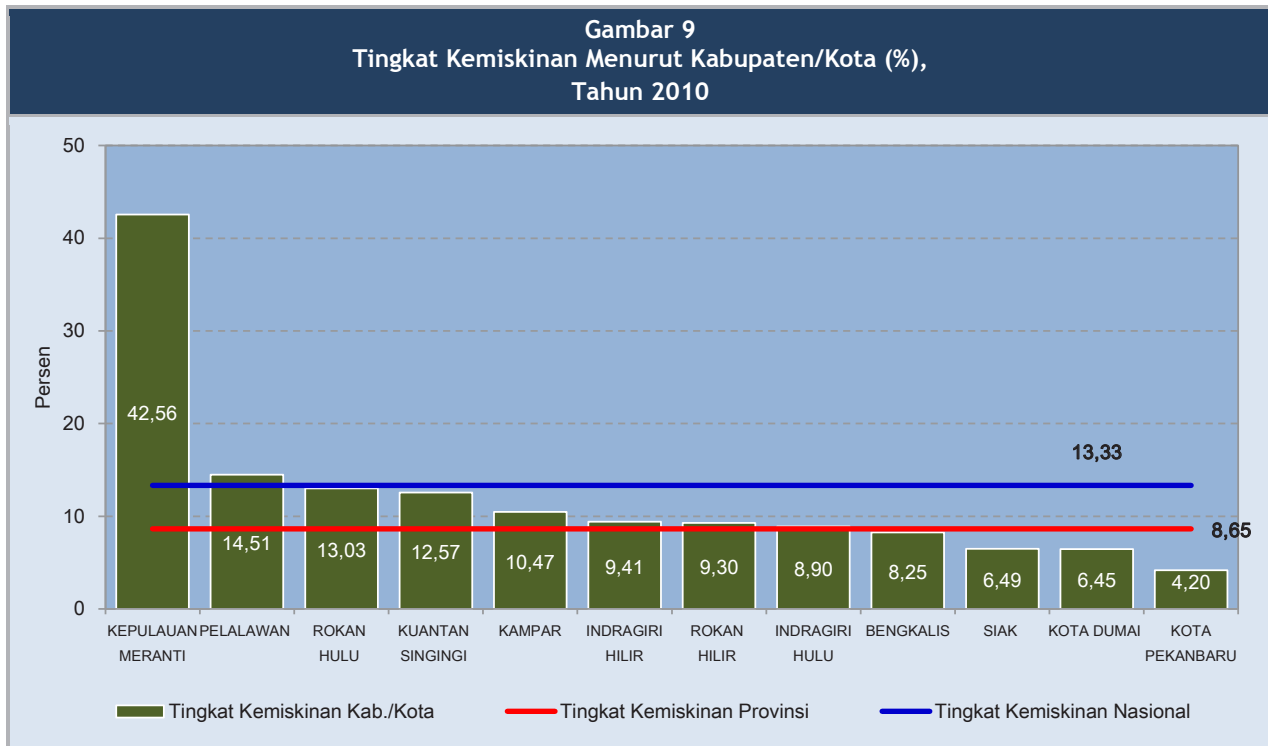


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

TINGKAT KEMISKINAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

INDIKATOR KEMISKINAN

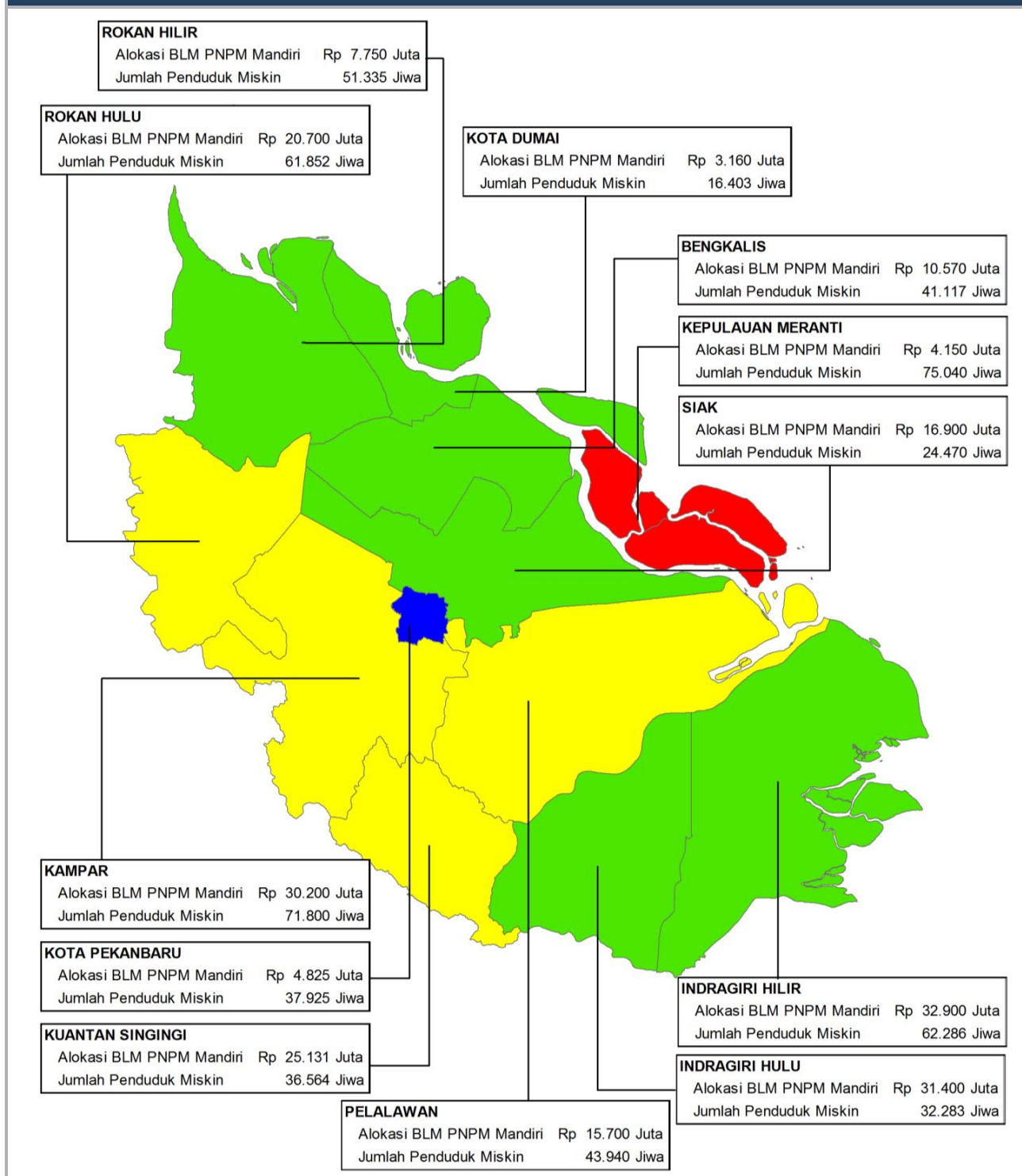
Tabel 4.
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
KUANTAN SINGINGI	299 369	325 060	14,42	12,57	42 740	36 564
INDRAGIRI HULU	269 484	292 610	10,25	8,90	35 982	32 283
INDRAGIRI HILIR	219 841	238 707	11,11	9,41	80 600	62 286
PELALAWAN	331 024	359 431	16,71	14,51	50 707	43 940
SIAK	247 965	269 244	5,71	6,49	20 191	24 470
KAMPAR	257 508	279 606	10,04	10,47	65 576	71 800
ROKAN HULU	289 554	318 432	15,49	13,03	68 008	61 852
BENGKALIS	295 967	325 485	7,91	8,25	63 434	41 117
ROKAN HILIR	227 571	250 267	9,32	9,30	55 956	51 335
KEPULAUAN MERANTI		339 327		42,56		75 040
KOTA PEKANBARU	300 852	326 670	3,92	4,20	33 418	37 925
KOTA DUMAI	261 859	287 975	6,08	6,45	15 651	16 403
RIAU	246 481	256 112	9,48	8,65	532 263	555 016
INDONESIA	220 996	242 815	14,15	13,33	31 762 840	30 996 063

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010)

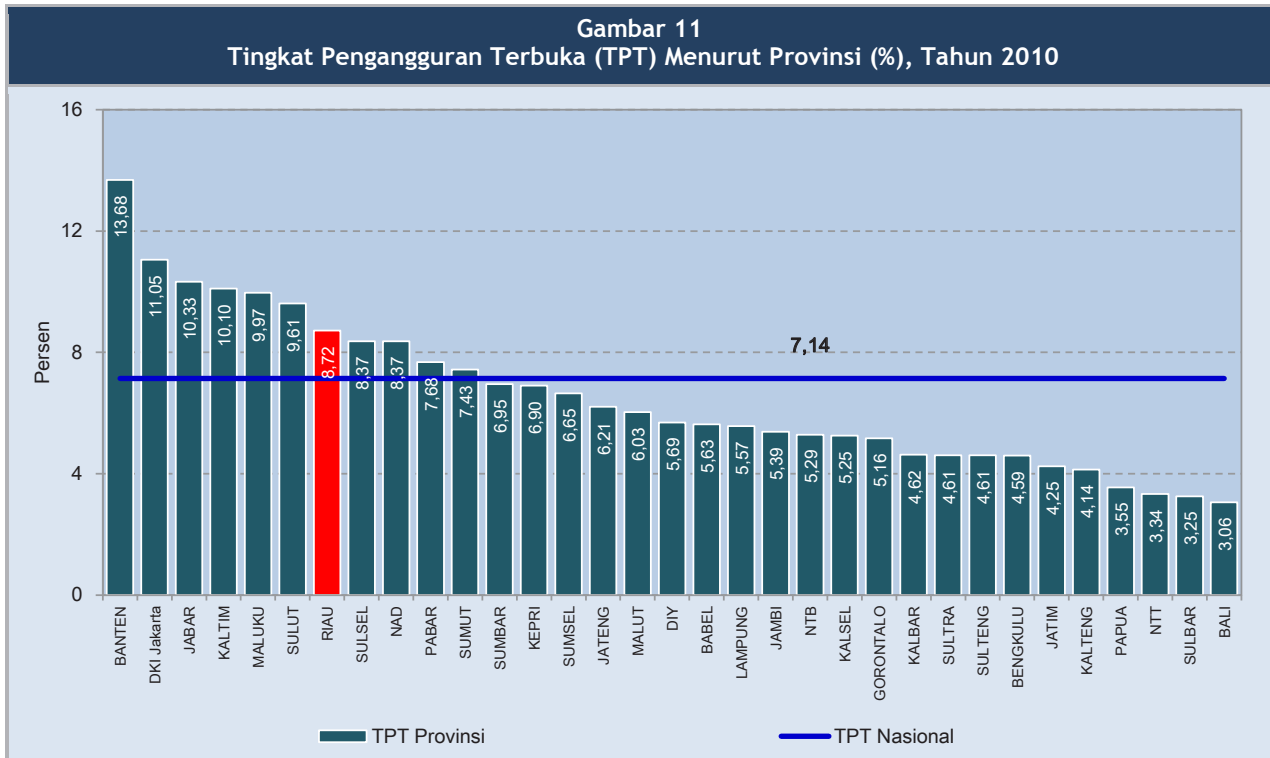
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Gambar 10
Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010,
Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota

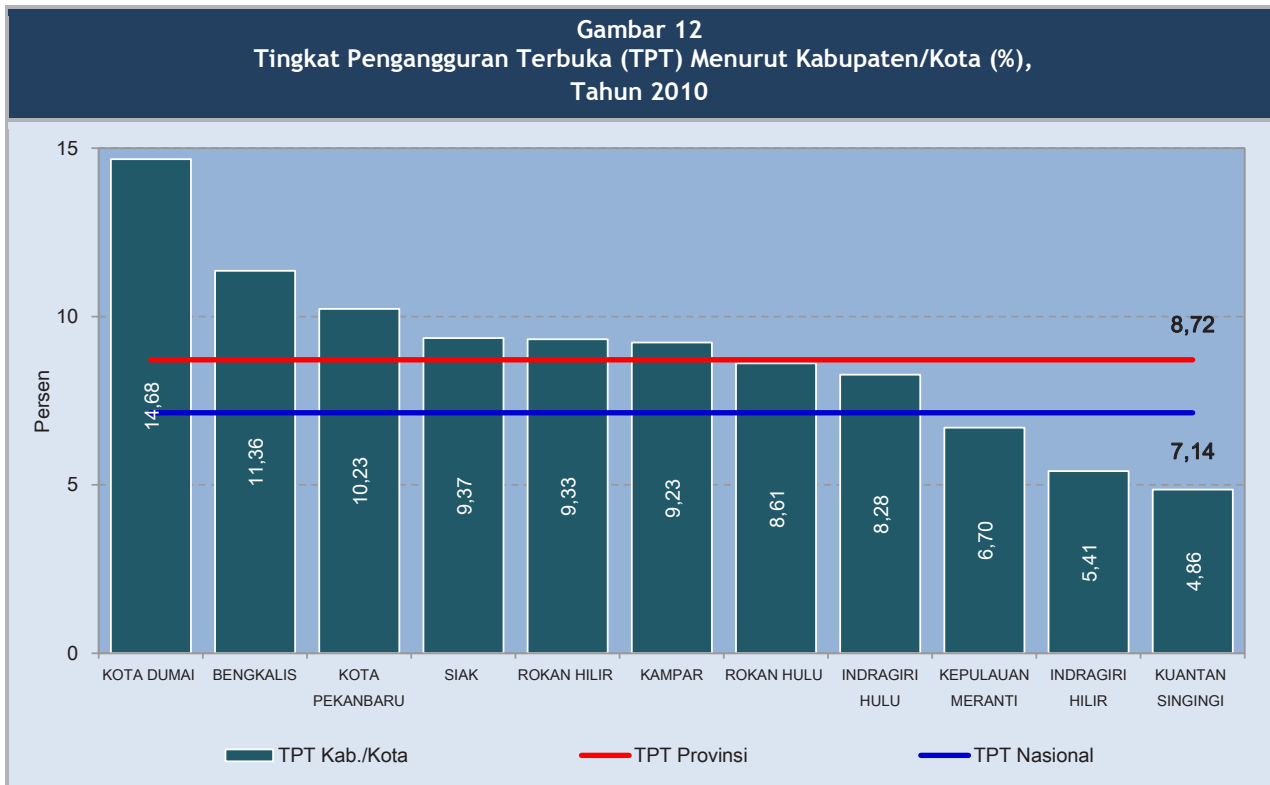


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN

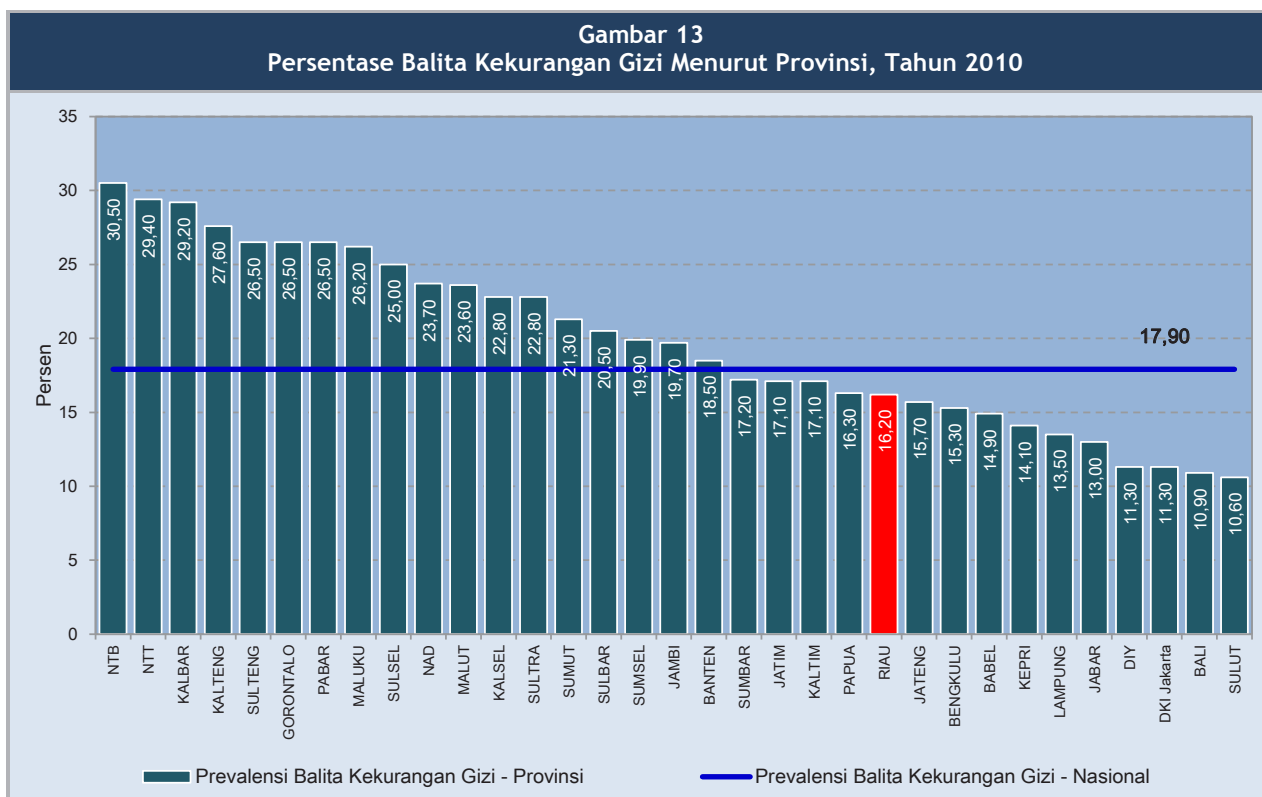
Tabel 5.
Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Daerah	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 14 Jam Seminggu		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 35 Jam Seminggu		Pekerja di Sektor Informal	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
KUANTAN SINGINGI	60,97	59,97	13,03	15,10	54,59	67,20	66,90	70,45
INDRAGIRI HULU	60,15	61,58	6,68	4,80	39,14	42,38	61,57	58,20
INDRAGIRI HILIR	66,75	68,23	2,82	2,70	33,34	43,95	76,82	76,46
PELALAWAN	66,92	61,36	7,42	5,65	39,36	41,94	66,47	60,05
SIAK	59,96	66,31	4,85	7,25	24,94	30,18	47,73	39,50
KAMPAR	61,82	60,30	4,29	5,93	33,32	38,38	60,18	55,51
ROKAN HULU	59,64	59,57	11,44	14,09	53,76	58,72	62,13	58,36
BENGKALIS	63,55	64,76	5,08	7,64	36,79	39,00	61,15	51,36
ROKAN HILIR	57,83	60,28	6,01	6,19	35,58	34,74	52,68	48,48
KEPULAUAN MERANTI		65,34		6,39		48,28		64,04
KOTA PEKANBARU	60,46	67,70	2,79	3,26	13,76	18,69	34,92	27,27
KOTA DUMAI	63,13	62,49	3,50	2,58	23,25	19,98	45,80	37,50
RIAU	62,08	63,66	5,46	6,18	33,86	37,87	58,58	52,14
NASIONAL	67,23	67,72	4,29	4,11	30,10	30,75	61,56	58,96

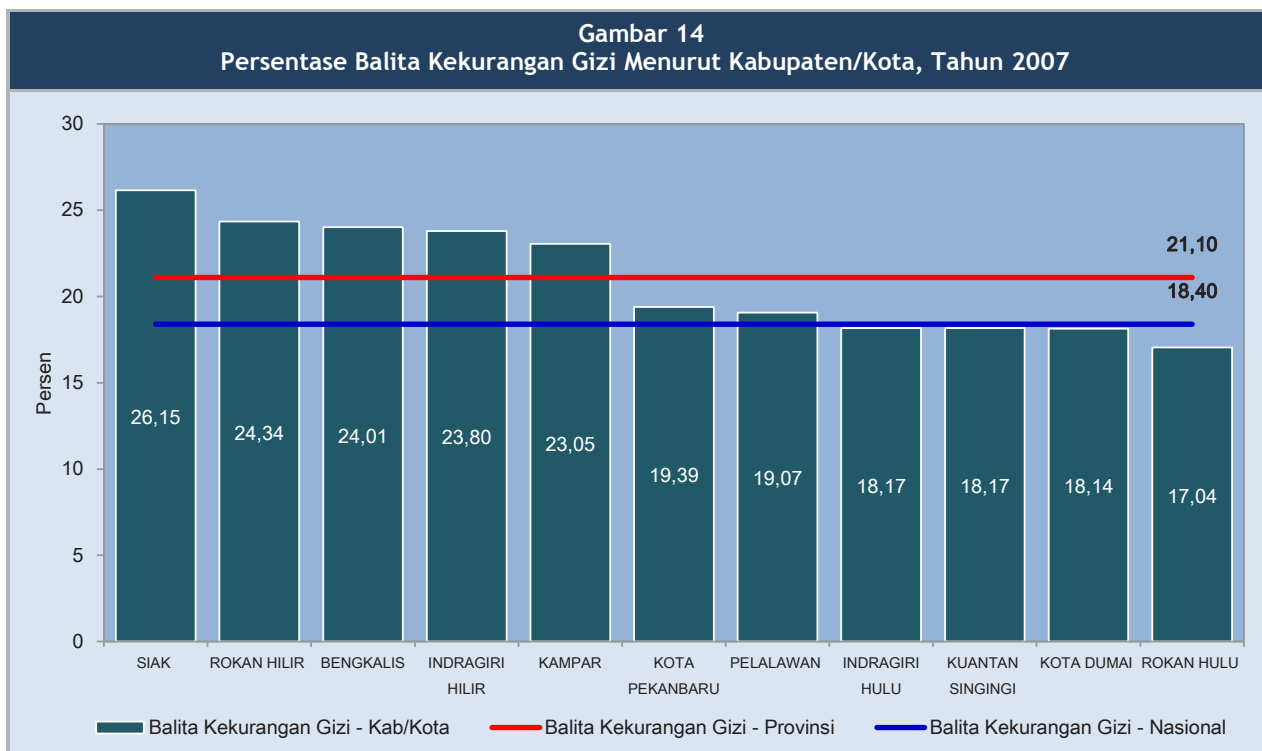
Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

BIDANG KESEHATAN

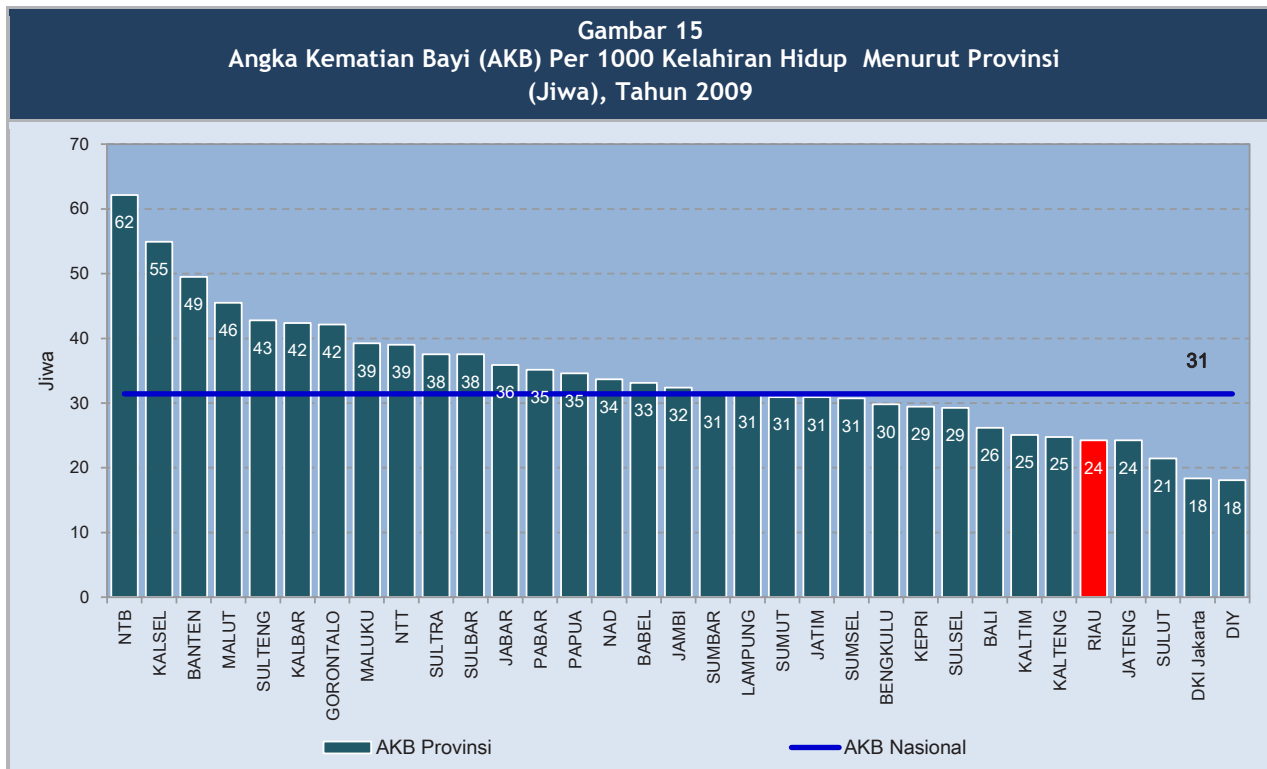


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2010

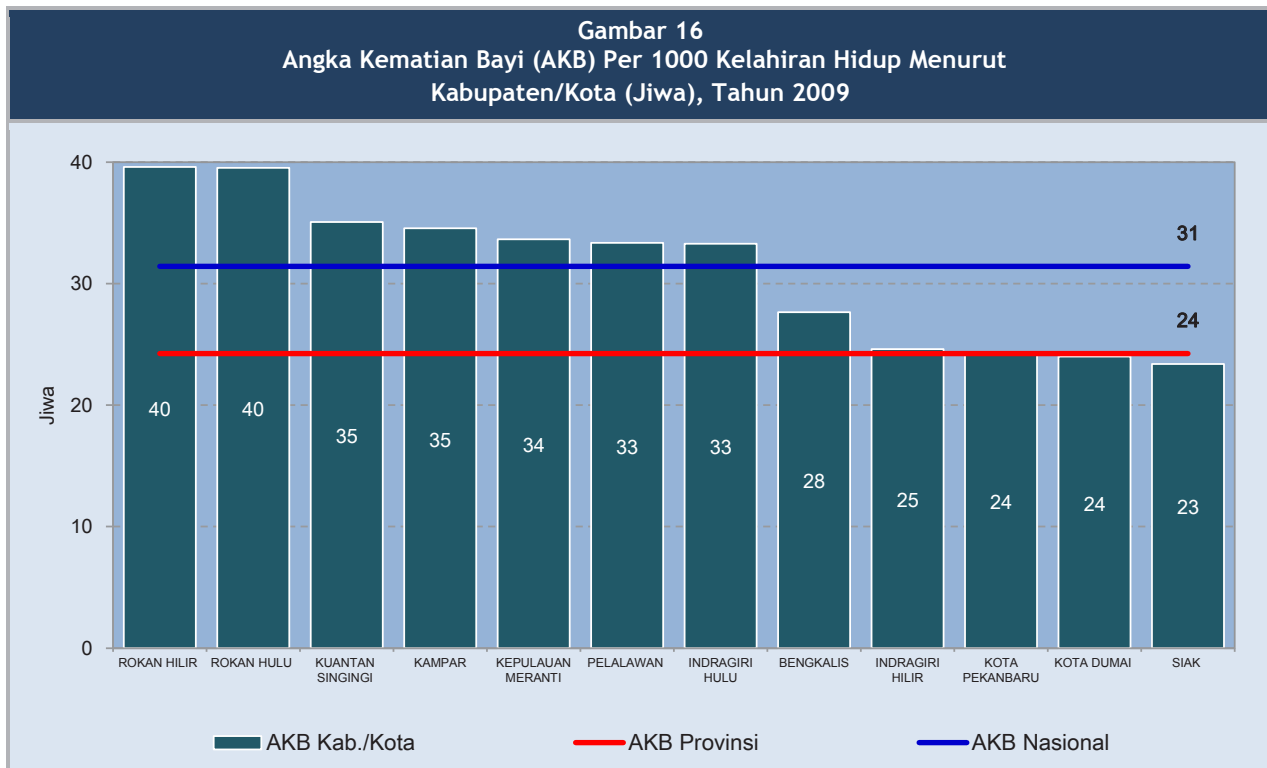


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007

BIDANG KESEHATAN

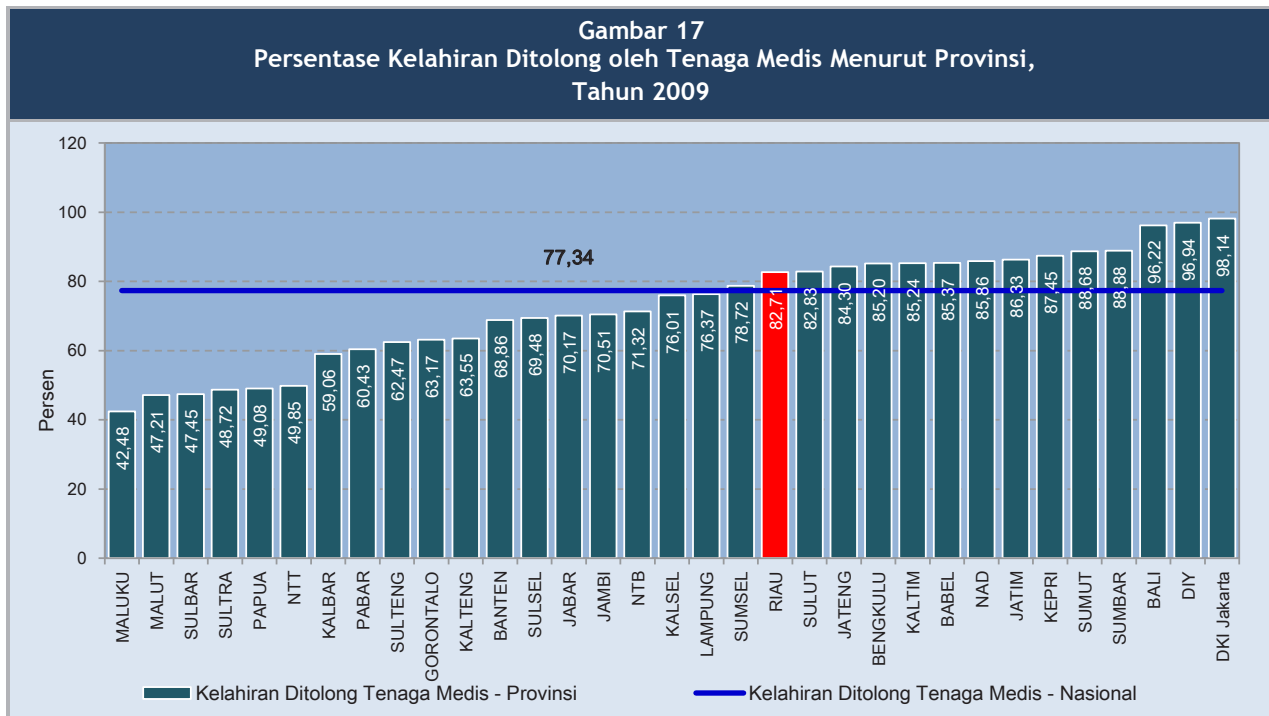


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

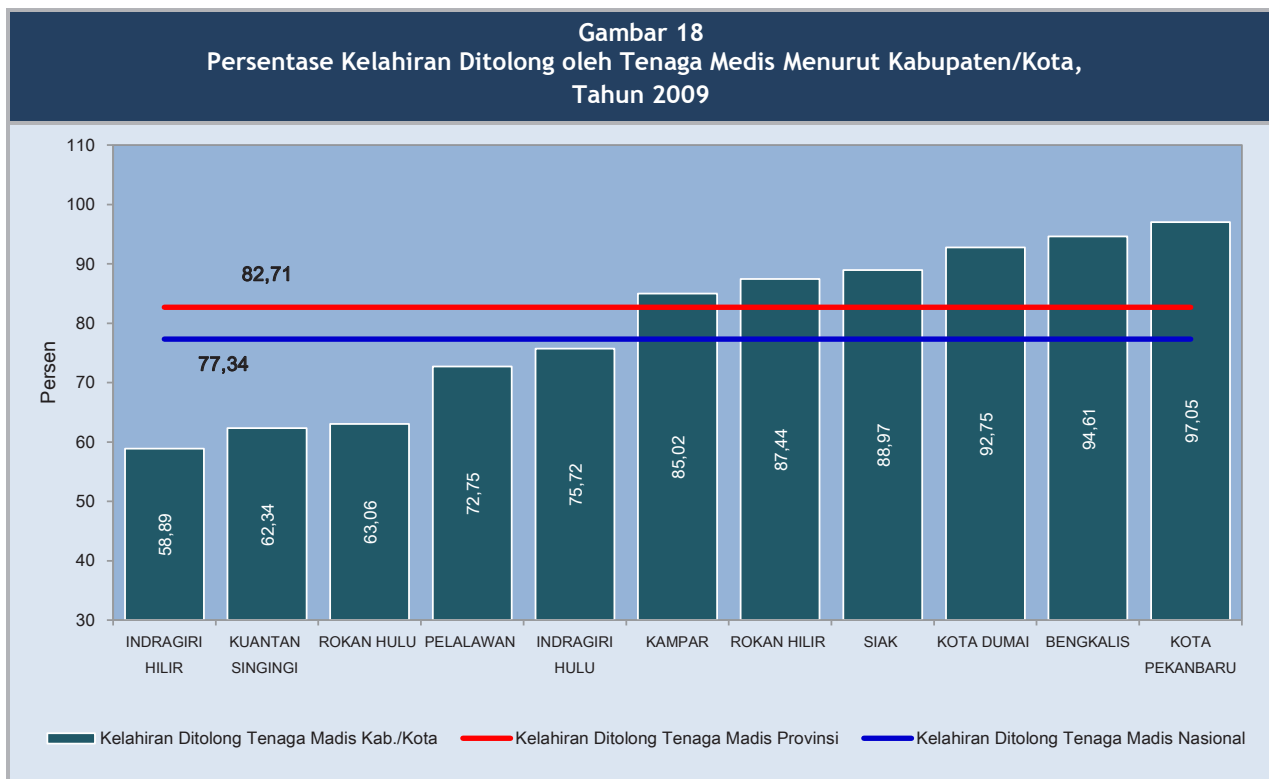


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

BIDANG KESEHATAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

BIDANG KESEHATAN

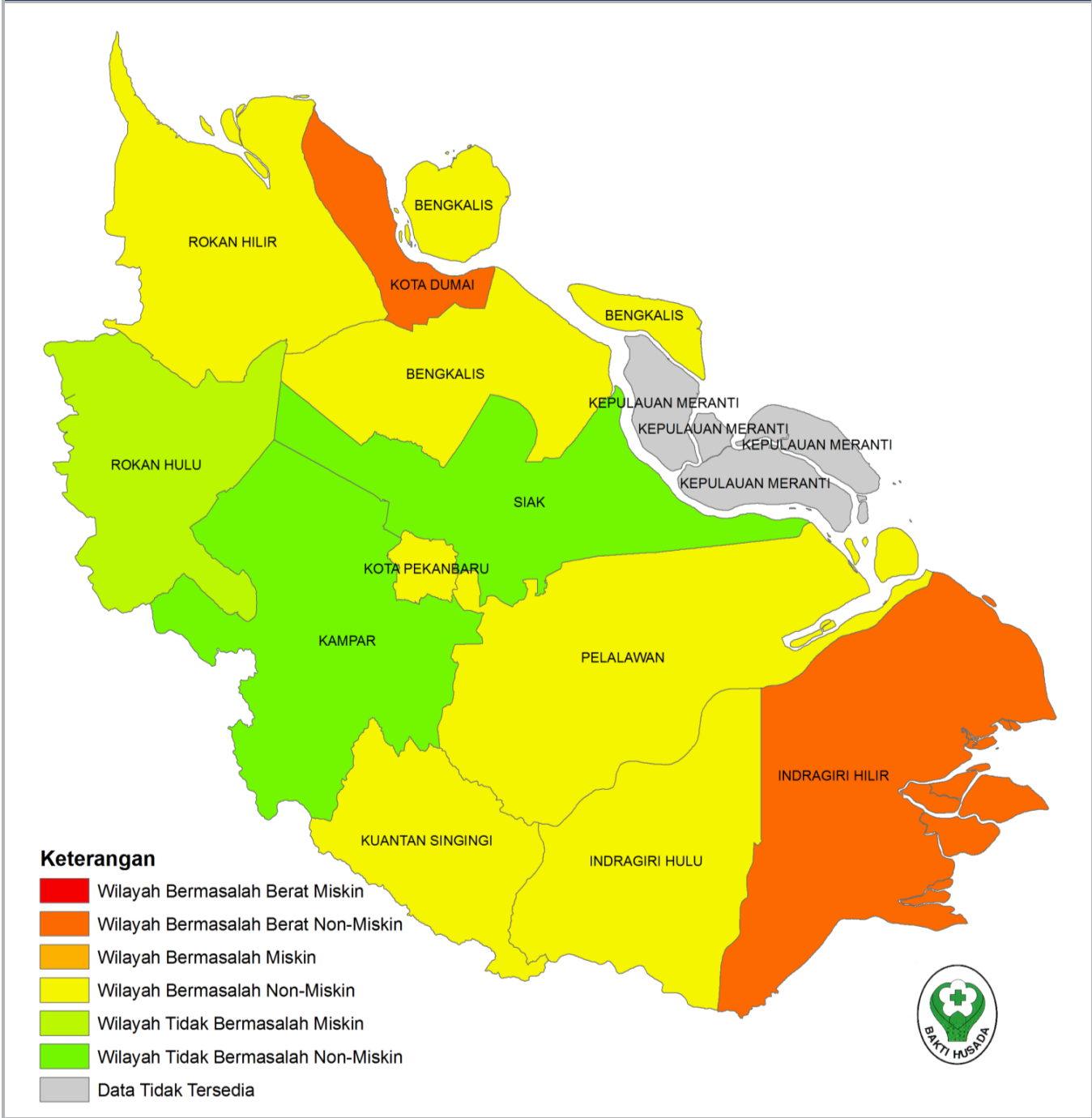
Tabel 6.
Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Penduduk dengan keluhan kesehatan	Angka Morbiditas	Rata-rata Lama Sakit	Penduduk yg Melakukan Pengobatan Sendiri
	(%)	(%)	(%)	(%)
KUANTAN SINGINGI	31,46	22,32	5,90	81,91
INDRAGIRI HULU	29,27	22,24	5,38	87,89
INDRAGIRI HILIR	27,16	17,86	4,67	80,56
PELALAWAN	42,41	27,15	6,06	79,03
SIAK	41,76	22,61	4,03	74,42
KAMPAR	32,51	21,23	5,26	60,50
ROKAN HULU	30,95	19,37	6,05	79,44
BENGKALIS	23,85	9,87	4,61	82,58
ROKAN HILIR	20,15	13,03	5,67	80,10
KOTA PEKANBARU	31,66	14,52	4,40	63,46
KOTA DUMAI	32,76	15,99	4,93	69,37
RIAU	29,89	17,43	5,13	74,70
INDONESIA	33,68	18,63	5,51	68,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

Gambar 19
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

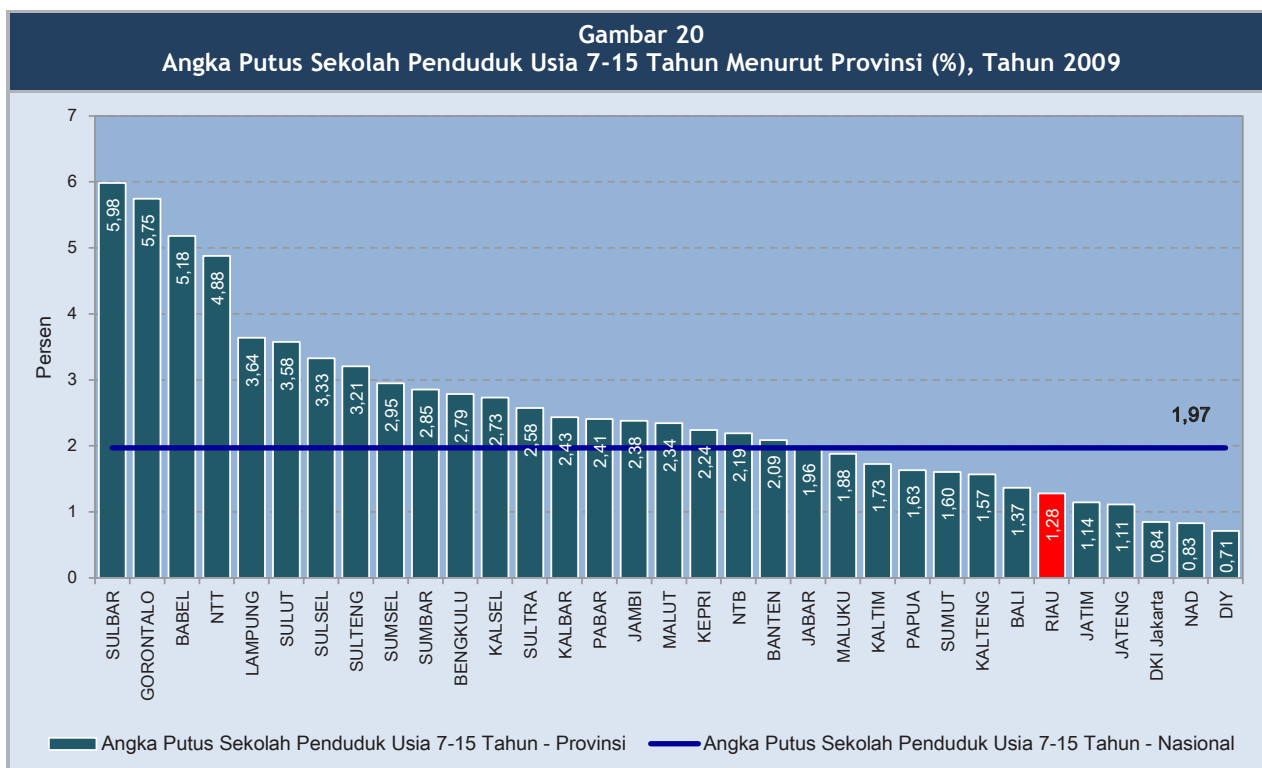
Tabel 7.
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)² Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kategori Wilayah	IPKM		Keterangan
		Rangking	Nilai	
KUANTAN SINGINGI	KaD	334	0,44	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
INDRAGIRI HULU	KaD	305	0,46	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
INDRAGIRI HILIR	KaB	413	0,37	Kabupaten Bermasalah Berat Non Miskin
PELALAWAN	KaD	268	0,48	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
SIAK	KaF	137	0,56	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
KAMPAR	KaF	220	0,51	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
ROKAN HULU	KaE	169	0,54	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
BENGKALIS	KaD	369	0,42	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
ROKAN HILIR	KaD	350	0,43	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
KOTA PEKAN BARU	KoD	105	0,59	Kota Bermasalah Non Miskin
KOTA DUMAI	KoB	150	0,55	Kota Bermasalah Berat Non Miskin

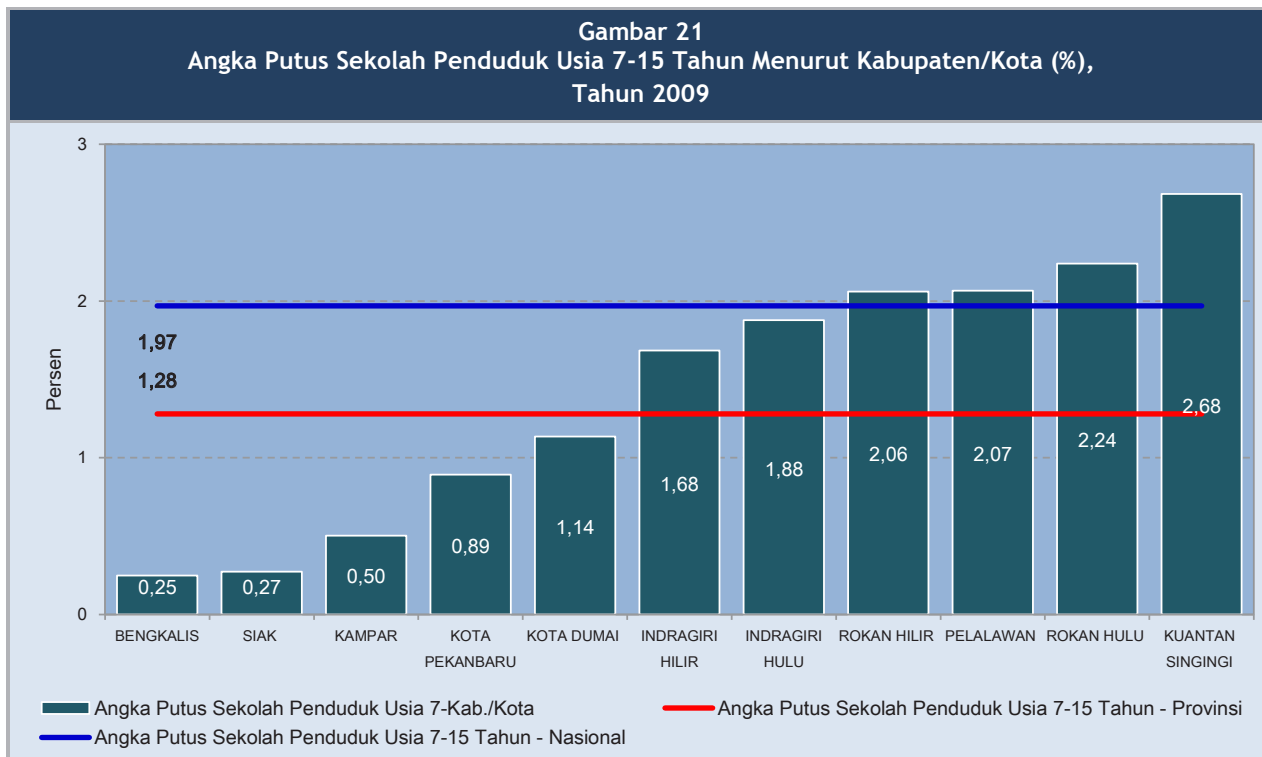
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

² IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan dan dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar); Susenas (Survei Ekonomi Nasional); dan Survei Podes (Potensi Desa). IPKM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan.

BIDANG PENDIDIKAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

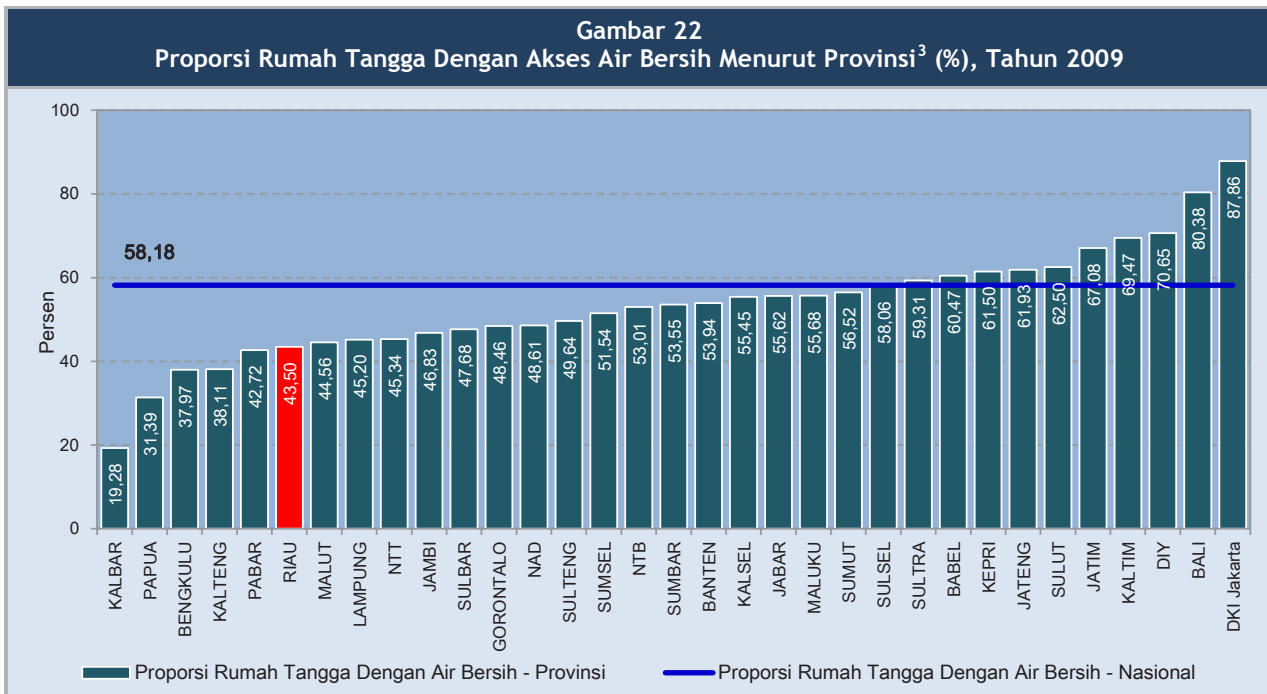
BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 8.
Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

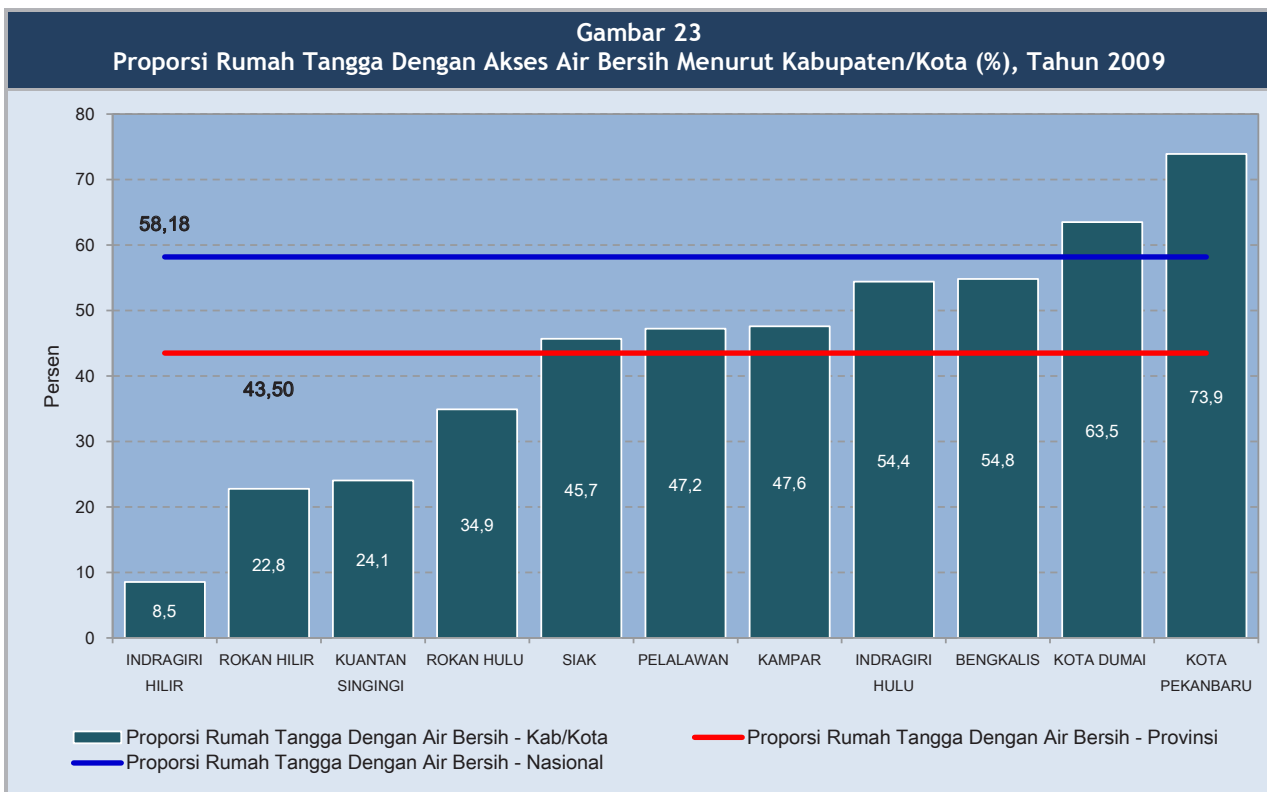
Daerah	Angka Partisipasi Pendidikan					
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
KUANTAN SINGINGI	109,80	97,08	82,86	77,13	77,62	58,02
INDRAGIRI HULU	113,26	96,89	82,46	73,08	67,88	48,12
INDRAGIRI HILIR	111,55	95,57	79,21	62,58	35,58	27,45
PELALAWAN	112,95	94,92	84,44	72,57	52,09	38,06
SIAK	110,21	99,13	107,91	88,11	69,00	60,95
KAMPAR	111,00	97,45	86,38	75,17	74,13	50,85
ROKAN HULU	118,45	97,85	66,87	62,65	69,96	52,98
BENGKALIS	112,37	96,97	70,98	63,16	108,22	69,30
ROKAN HILIR	114,95	97,96	84,78	76,46	65,01	50,10
KOTA PEKANBARU	102,10	88,86	105,79	69,02	82,86	55,01
KOTA DUMAI	102,50	87,99	97,33	67,13	89,13	64,43
RIAU	110,76	95,52	85,24	70,57	72,46	51,78
INDONESIA	110,42	94,37	81,25	67,43	62,55	45,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

AKSES TERHADAP AIR BERSIH



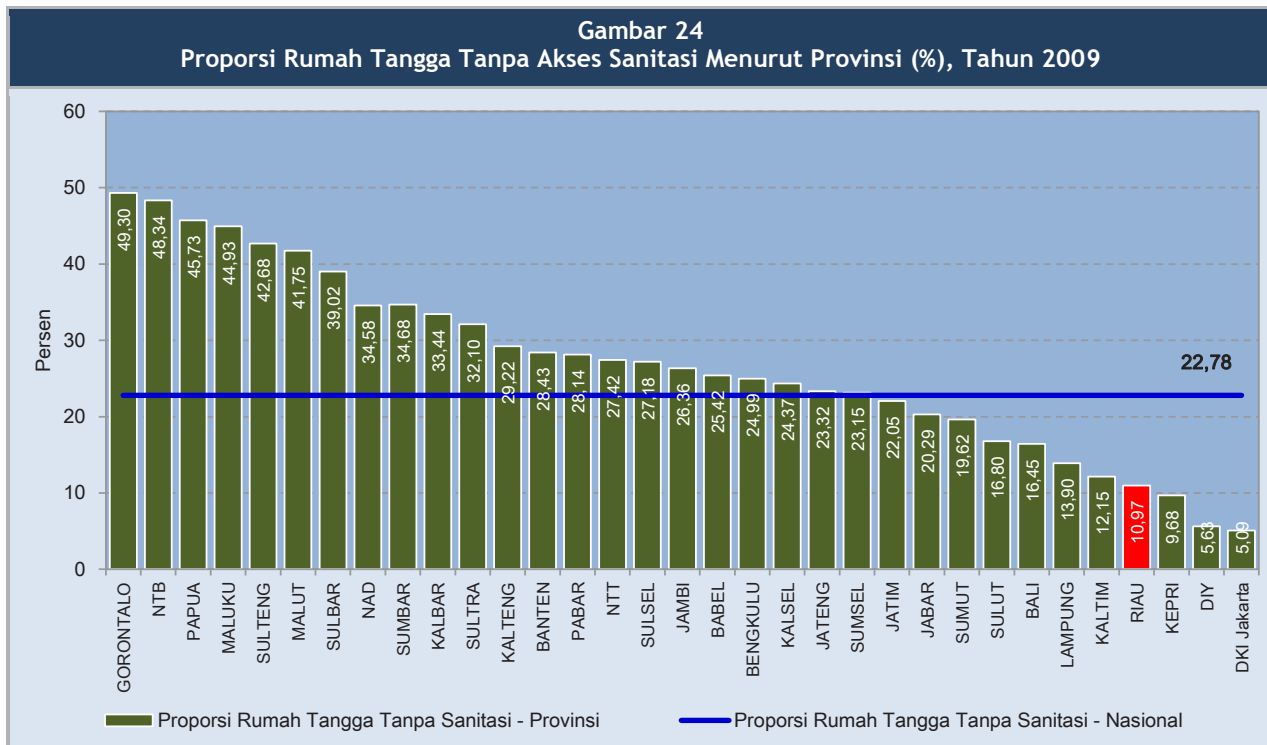
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



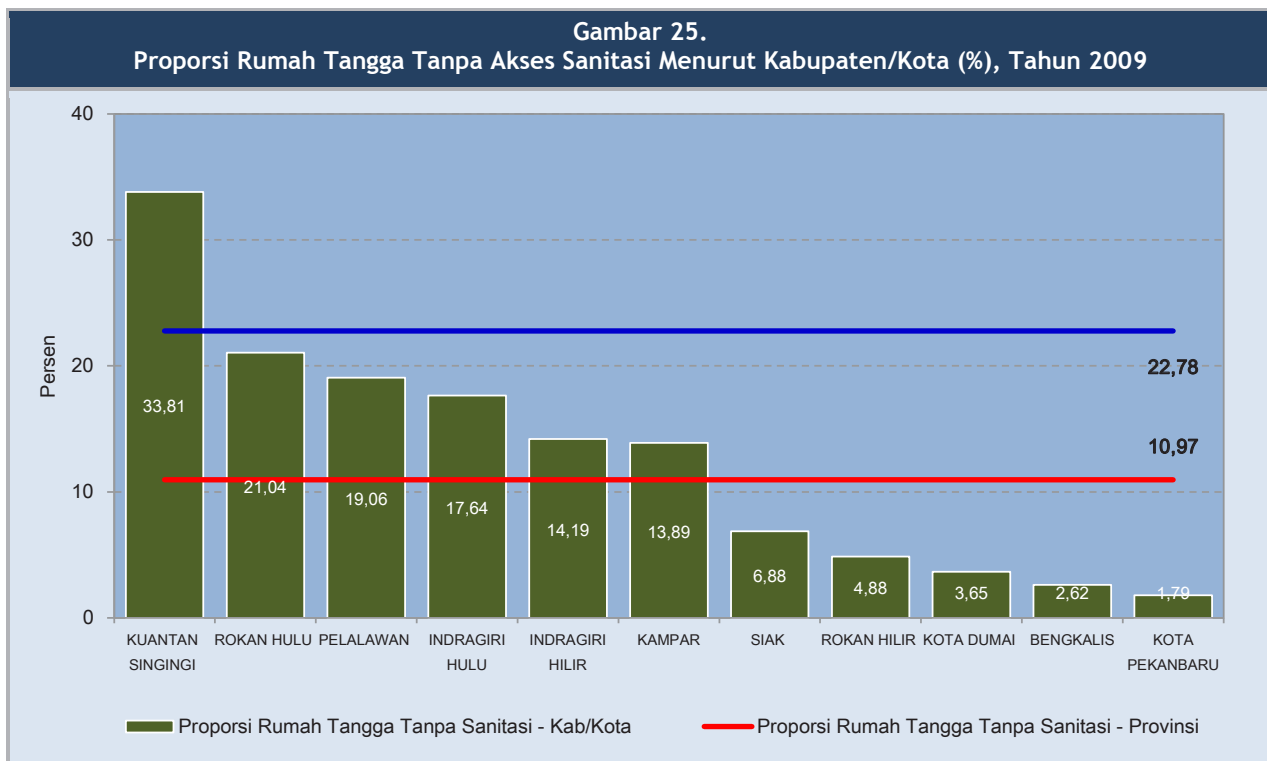
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

³ Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat

AKSES TERHADAP SANITASI

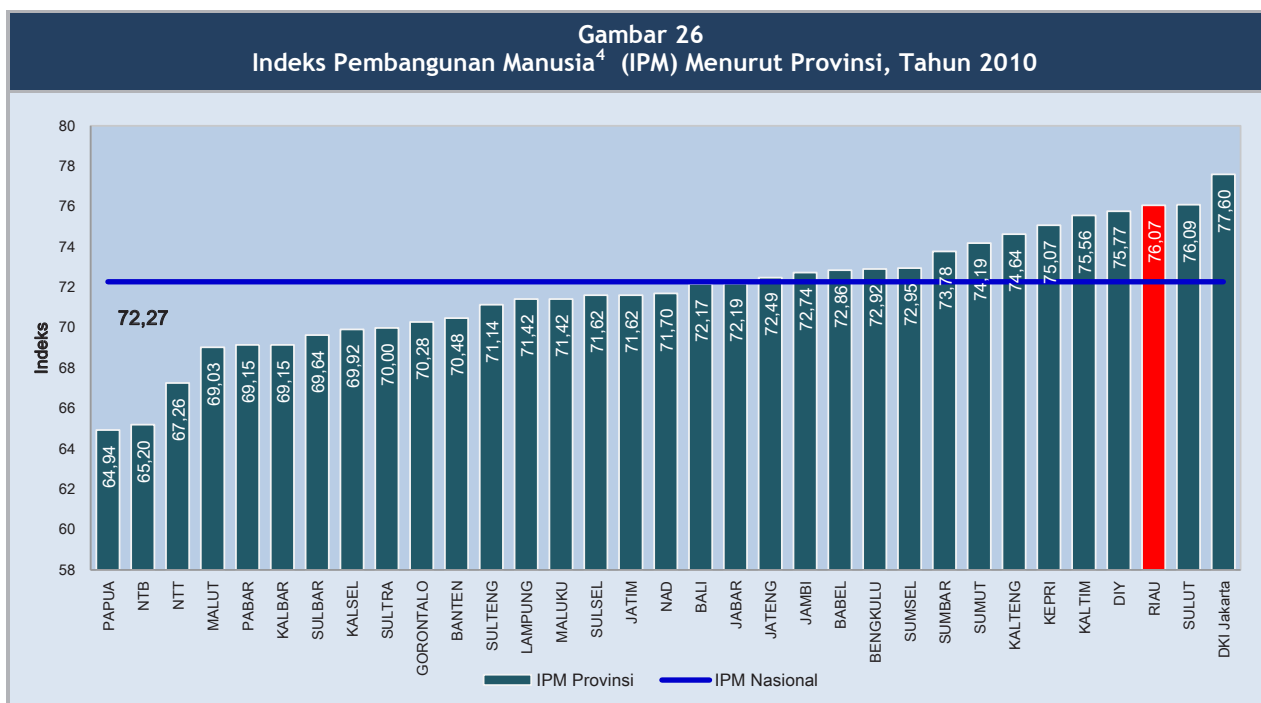


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

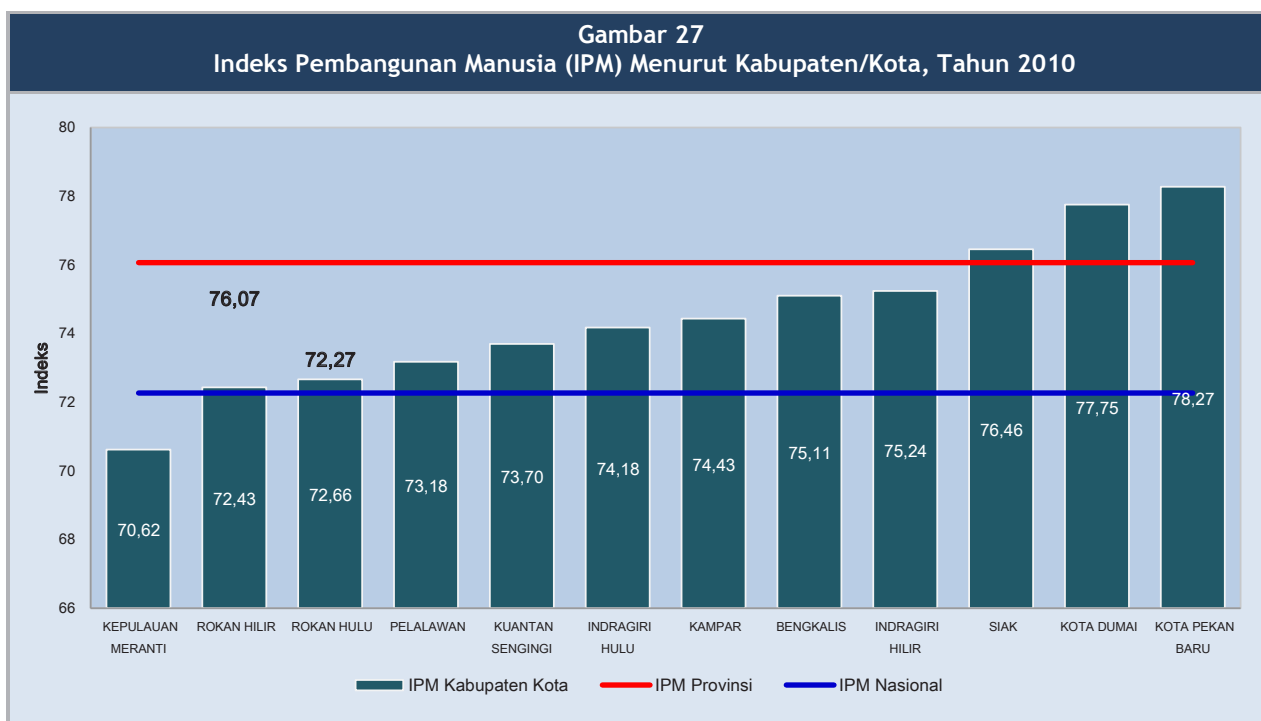


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

⁴ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran kesejahteraan dengan membandingkan antara harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Ukuran kesejahteraan tersebut diperkenalkan dan diterbitkan oleh PBB dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) sejak tahun 1990.

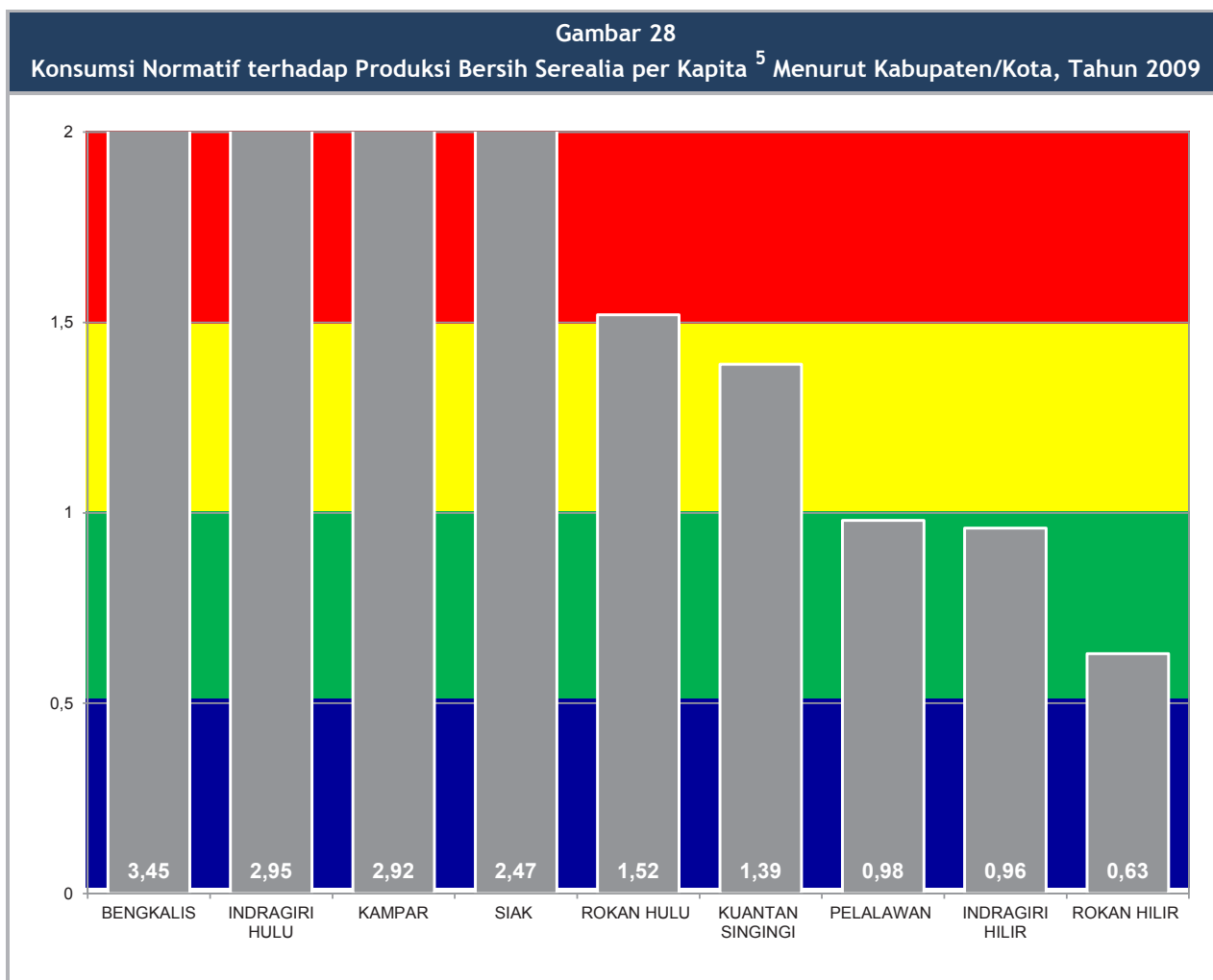
KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 9.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rupiah PPP)		2009	2010
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		
KUANTAN SENGINGI	68,22	68,33	97,81	97,82	7,81	7,99	643,52	645,21	73,38	73,70
INDRAGIRI HULU	68,71	68,81	97,76	98,16	7,96	7,98	645,47	647,10	73,89	74,18
INDRAGIRI HILIR	71,14	71,39	98,79	99,06	7,62	7,62	641,97	643,16	74,95	75,24
PELALAWAN	68,69	68,82	98,44	98,46	7,95	8,21	628,19	630,99	72,69	73,18
SIAK	71,52	71,69	98,49	98,56	9,03	9,08	640,78	644,22	76,05	76,46
KAMPAR	68,36	68,52	98,44	98,48	8,46	8,49	644,34	646,68	74,14	74,43
ROKAN HULU	67,13	67,17	97,98	98,28	7,55	7,56	639,42	642,94	72,29	72,66
BENGKALIS	70,24	70,35	97,79	98,09	8,99	9,12	634,08	637,23	74,64	75,11
ROKAN HILIR	67,11	67,18	97,80	97,99	7,48	7,87	636,69	637,78	71,98	72,43
KEPULAUAN MERANTI	68,61	68,73	89,73	90,18	7,32	7,32	626,84	630,86	70,15	70,62
KOTA PEKAN BARU	71,24	71,45	99,80	99,87	11,32	11,33	640,57	644,04	77,86	78,27
KOTA DUMAI	71,33	71,64	99,30	99,31	9,72	9,72	649,88	653,00	77,33	77,75
RIAU	71,25	71,40	98,11	98,35	8,56	8,58	642,55	646,63	75,60	76,07
INDONESIA	69,21	69,43	92,58	92,91	7,72	7,92	631,46	633,64	71,76	72,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

KETAHANAN PANGAN



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, 2009 dan Riau Dalam Angka (BPS), 2010.

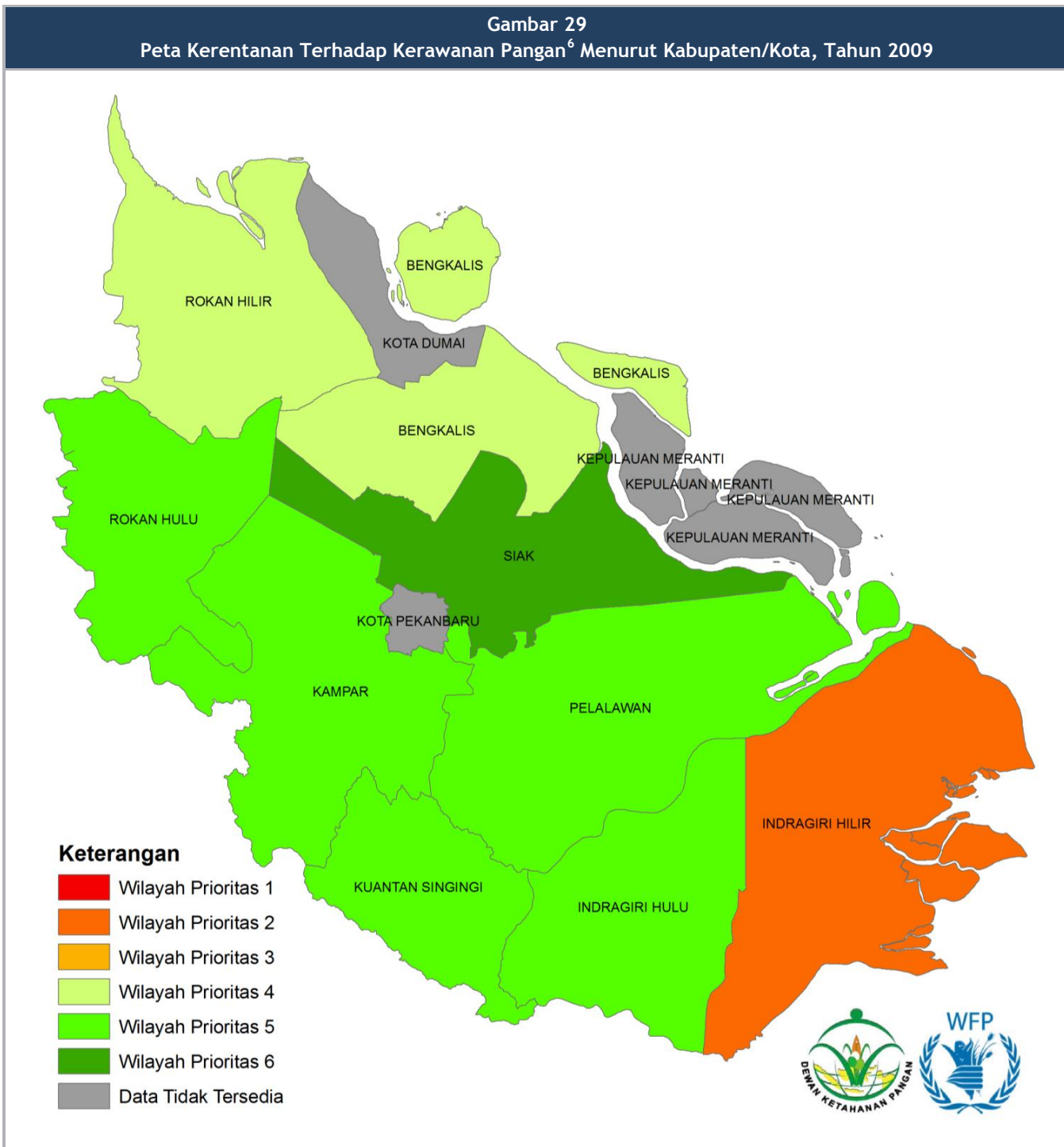
Keterangan:

- >1,5 Defisit Tinggi
- 1 – 1,5 Defisit Sedang
- 0,5 – 1 Surplus Rendah
- 0 – 0,5 Surplus Tinggi
- 0 Data Tidak Tersedia

⁵ Merupakan salah satu ukuran ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota dan termasuk dalam Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA) diperkenalkan oleh DKP, Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada tahun 2005.

KETAHANAN PANGAN

Gambar 29
Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan⁶ Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009

⁶ Pada tahun 2009, cakupan diperluas dari 30 provinsi di 265 kabupaten menjadi 32 provinsi dan 346 kabupaten serta merupakan konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan yang dipublikasikan dengan nama "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)"

Tabel 10.
Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Ketersediaan Pangan			Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi					Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)	
	Produksi Bersih Serealia- Kab./Kota (Kg/ kapita/ hari)	Rasio Konsumsi Normatif- Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)	Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)	2008		2009
KUANTAN SINGINGI	216	1,39	14,42	32,74	0,00	5,31	68,22	22,5	12,92	75,95	2008	2009	288,5
INDRAGIRI HULU	102	2,95	10,25	29,20	0,52	3,03	68,71	21,2	17,53	45,61	2008	2009	298,1
INDRAGIRI HILIR	312	0,96	11,11	62,72	17,10	1,67	71,14	29,9	8,81	91,46	2008	2009	319,7
PELALAWAN	307	0,98	16,71	39,88	5,93	4,88	68,69	23,7	34,75	52,79	2008	2009	533,9
SIAK	122	2,47	5,71	11,44	2,65	3,29	71,52	33,0	16,81	54,33	2008	2009	379,3
KAMPAR	103	2,92	10,04	13,51	4,53	2,27	68,36	26,9	9,05	52,41	2008	2009	233,0
ROKAN HULU	198	1,52	15,49	36,26	0,00	2,55	67,13	18,8	11,92	65,08	2008	2009	248,7
BENGLALIS	87	3,45	7,91	26,53	1,71	4,36	70,24	30,0	22,29	45,21	2008	2009	438,5
ROKAN HILIR	475	0,63	9,32	27,55	3,39	3,34	67,11	29,5	22,88	77,21	2008	2009	463,8
KEPULAUAN MERANTI***	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	68,61	n/a	n/a	n/a	2008	2009	n/a
KOTA PEKANBARU**	n/a	n/a	3,92	4,55	0,00	0,69	71,24	22,1	0,00	26,12	2008	2009	n/a
KOTA DUMAJI**	n/a	n/a	6,08	1,63	0,00	1,64	71,33	22,4	3,13	36,53	2008	2009	n/a

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009.

Keterangan:

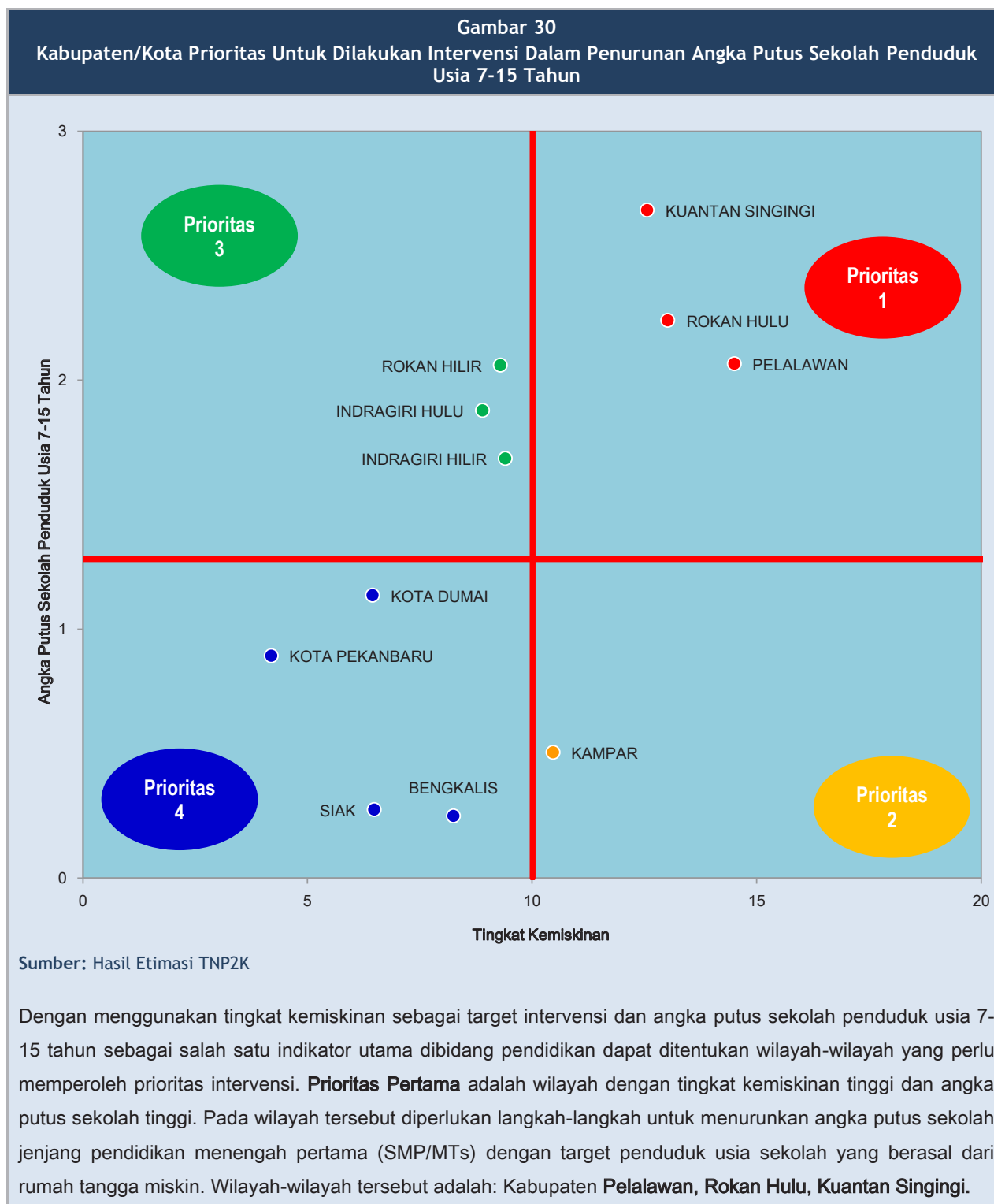
*Air Bersih dihitung dengan menggunakan kontrol jarak dari tempat pembuangan kotoran/limbah

** Terdapat beberapa komponen dari Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)

yang tidak terhitung karena belum terdata secara lengkap.

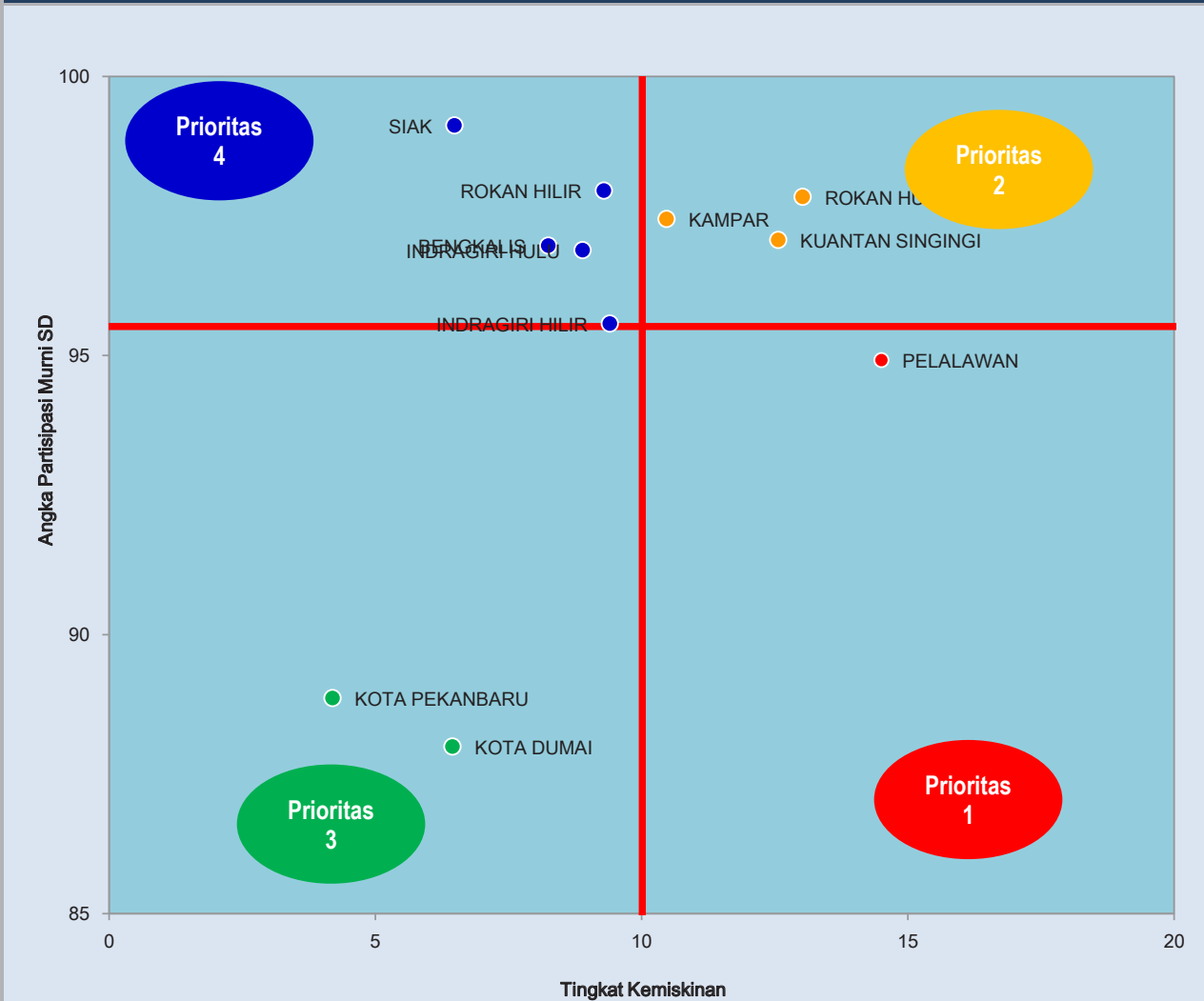
*** Data tidak tersedia (wilayah pemekaran).

PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

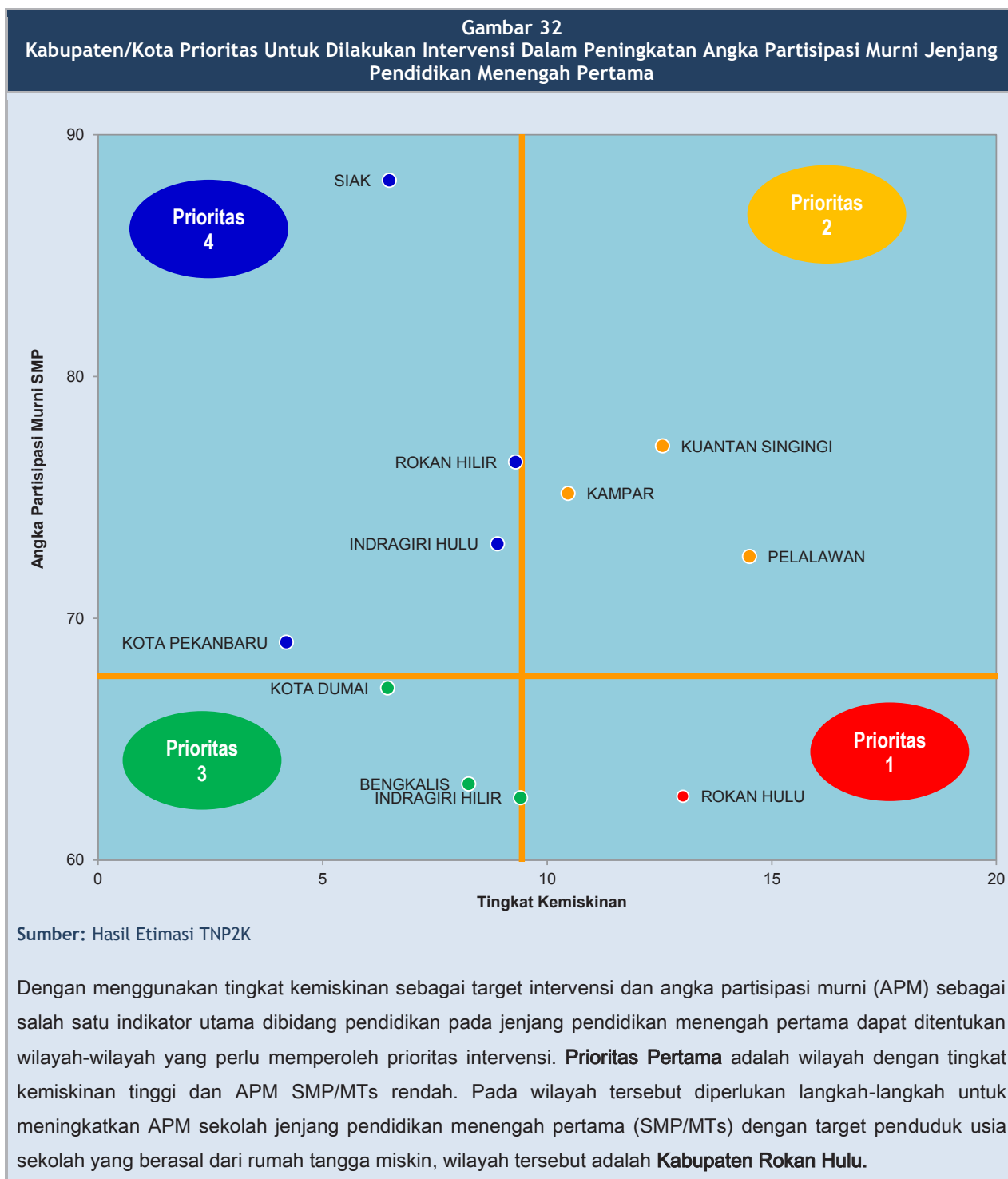
Gambar 31
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)



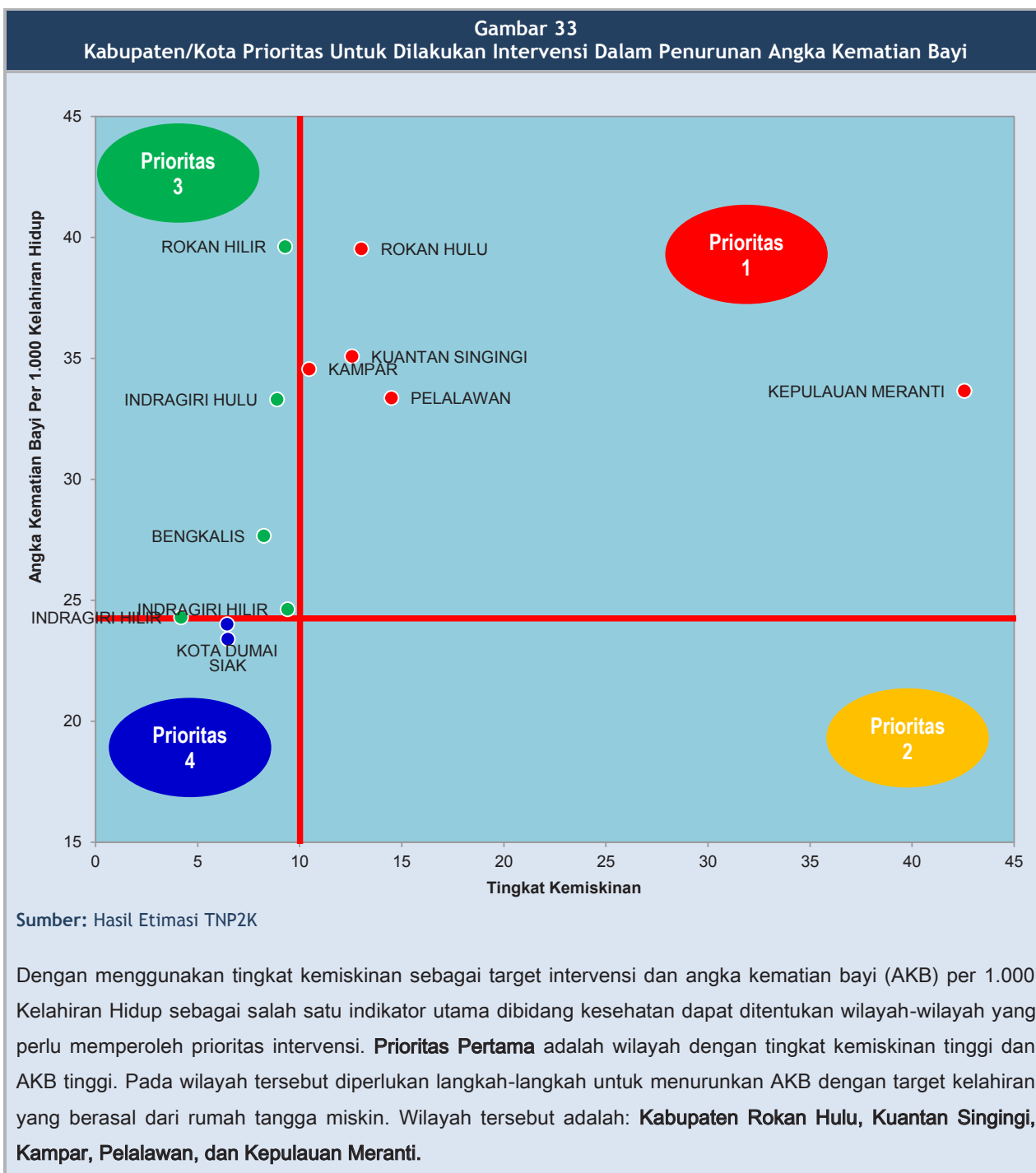
Sumber: Hasil Etimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SD/MI rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan dasar (SD/MI) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah Kabupaten **Pelalawan**.

PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

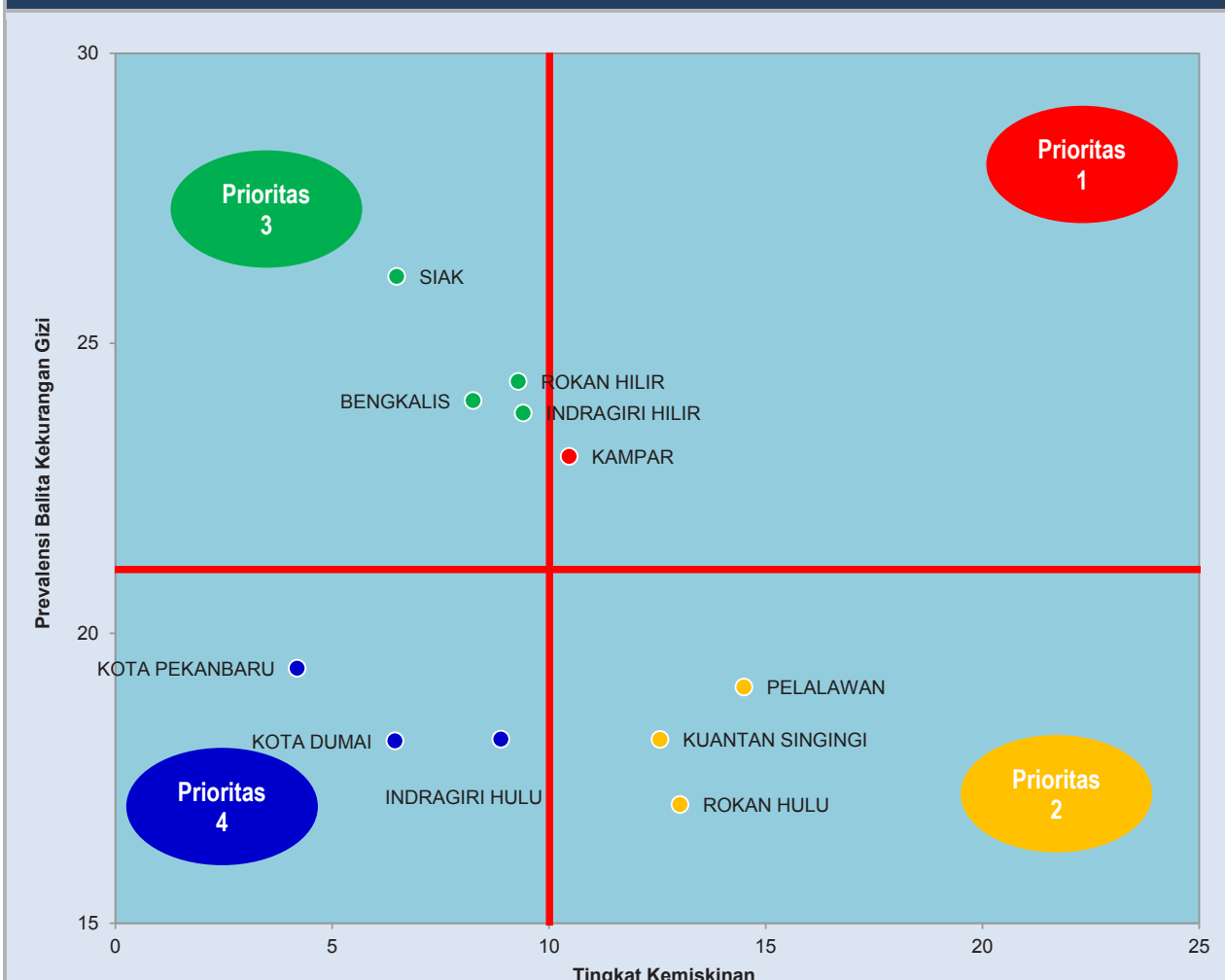


PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

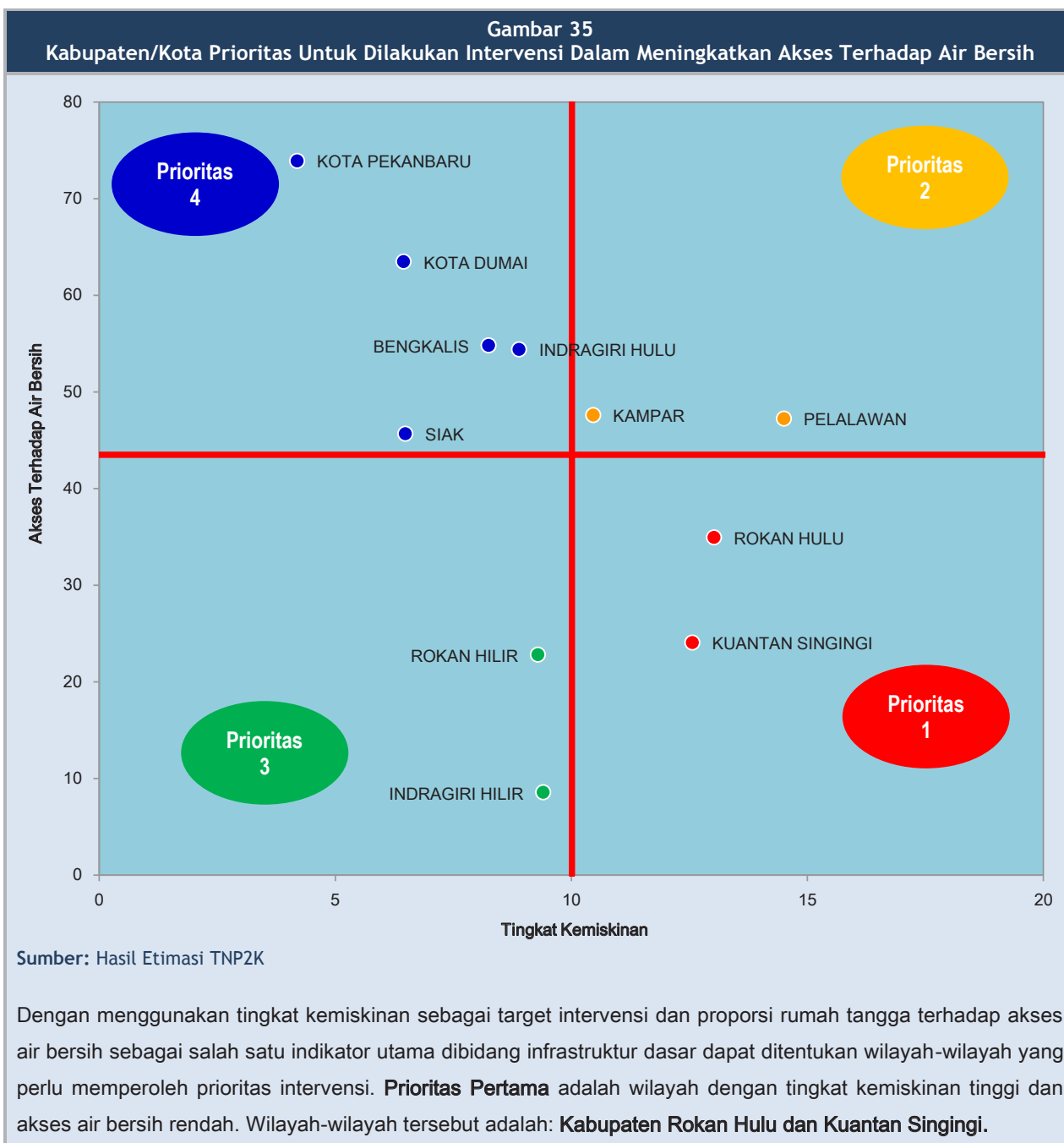
Gambar 34
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi



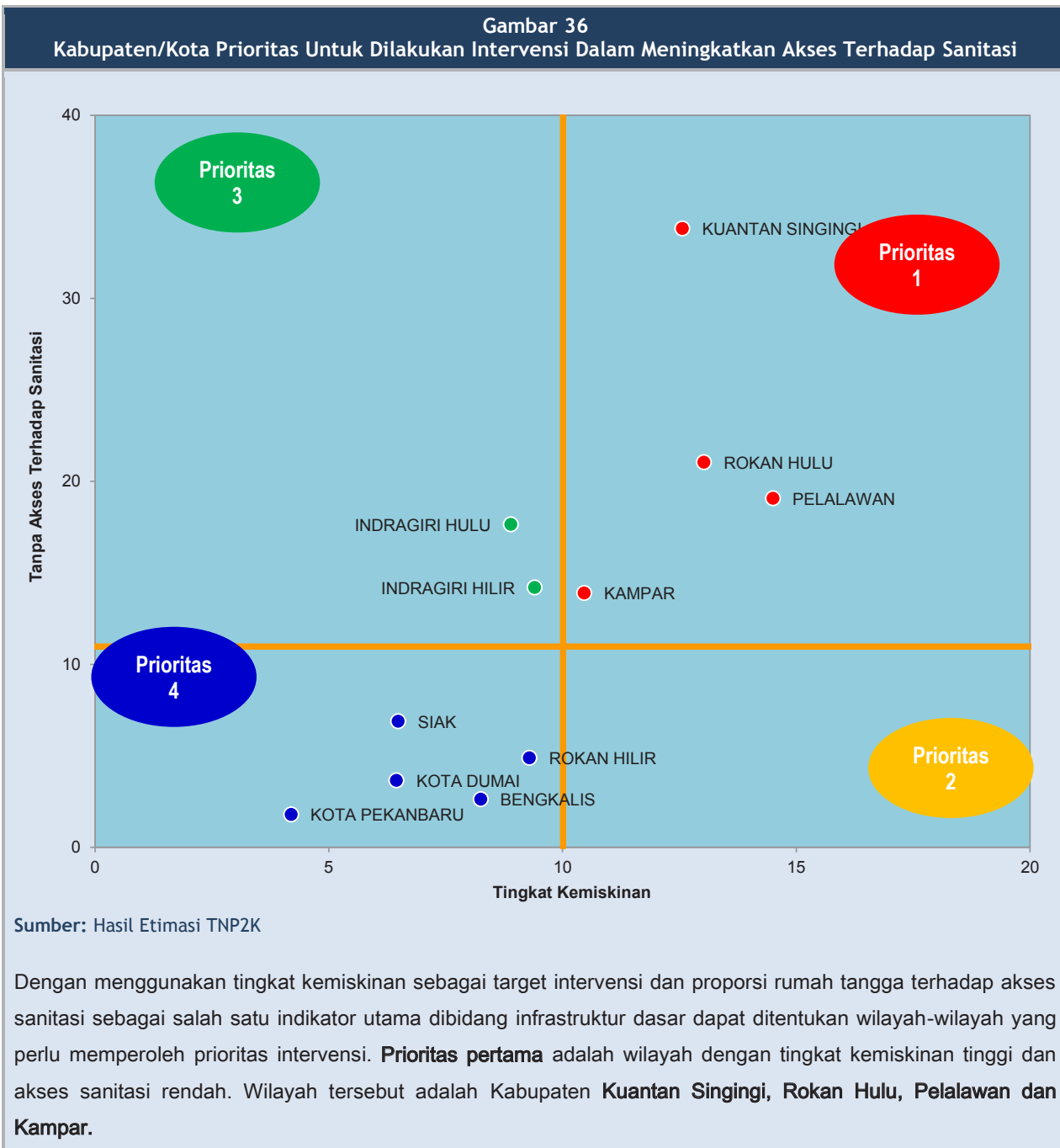
Sumber: Hasil Etimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan prevalensi balita kekurangan gizi sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan prevalensi balita kekurangan gizi tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan prevalensi balita kekurangan gizi dengan target balita yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya adalah: **Kabupaten Kampar**.

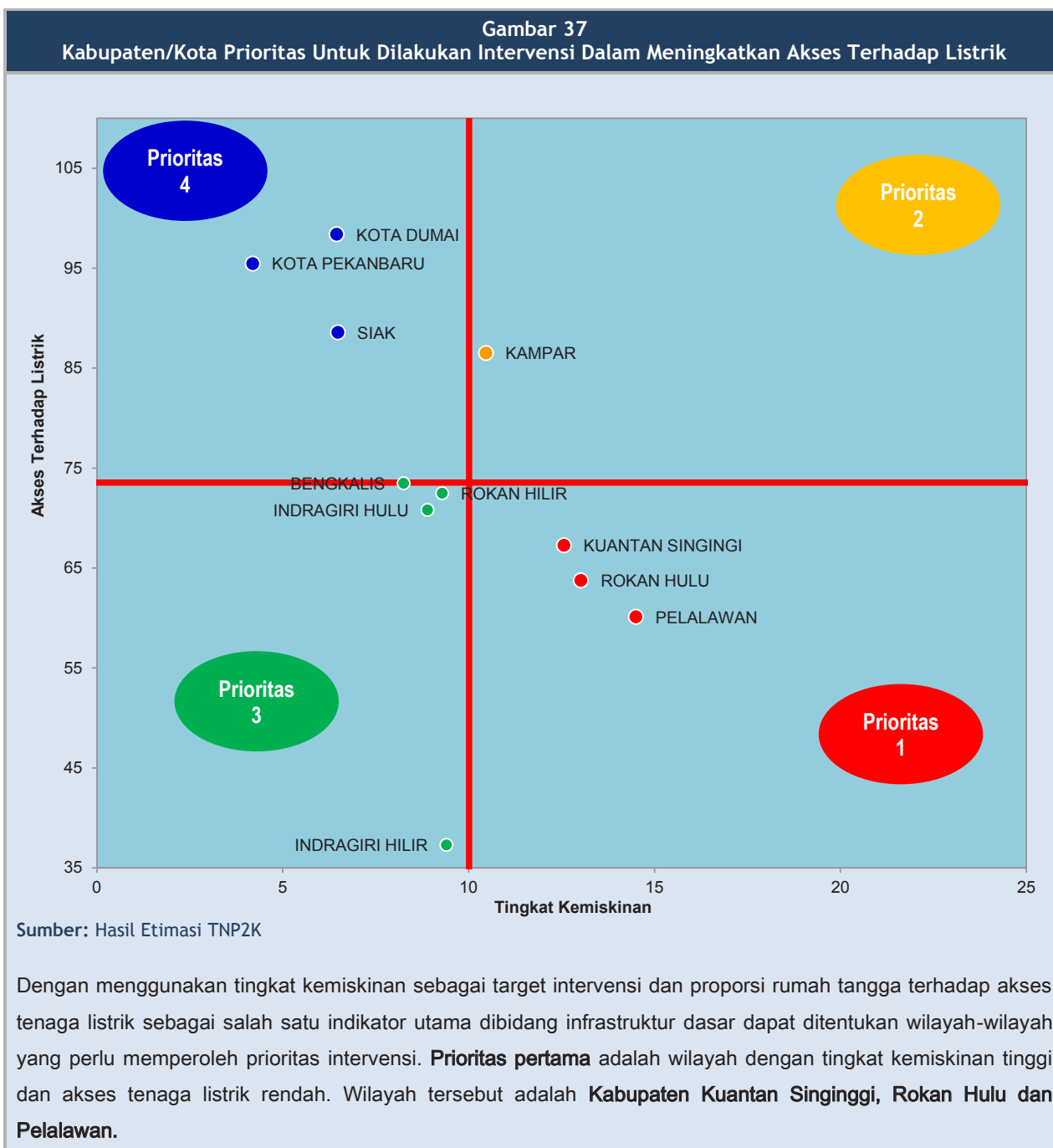
PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



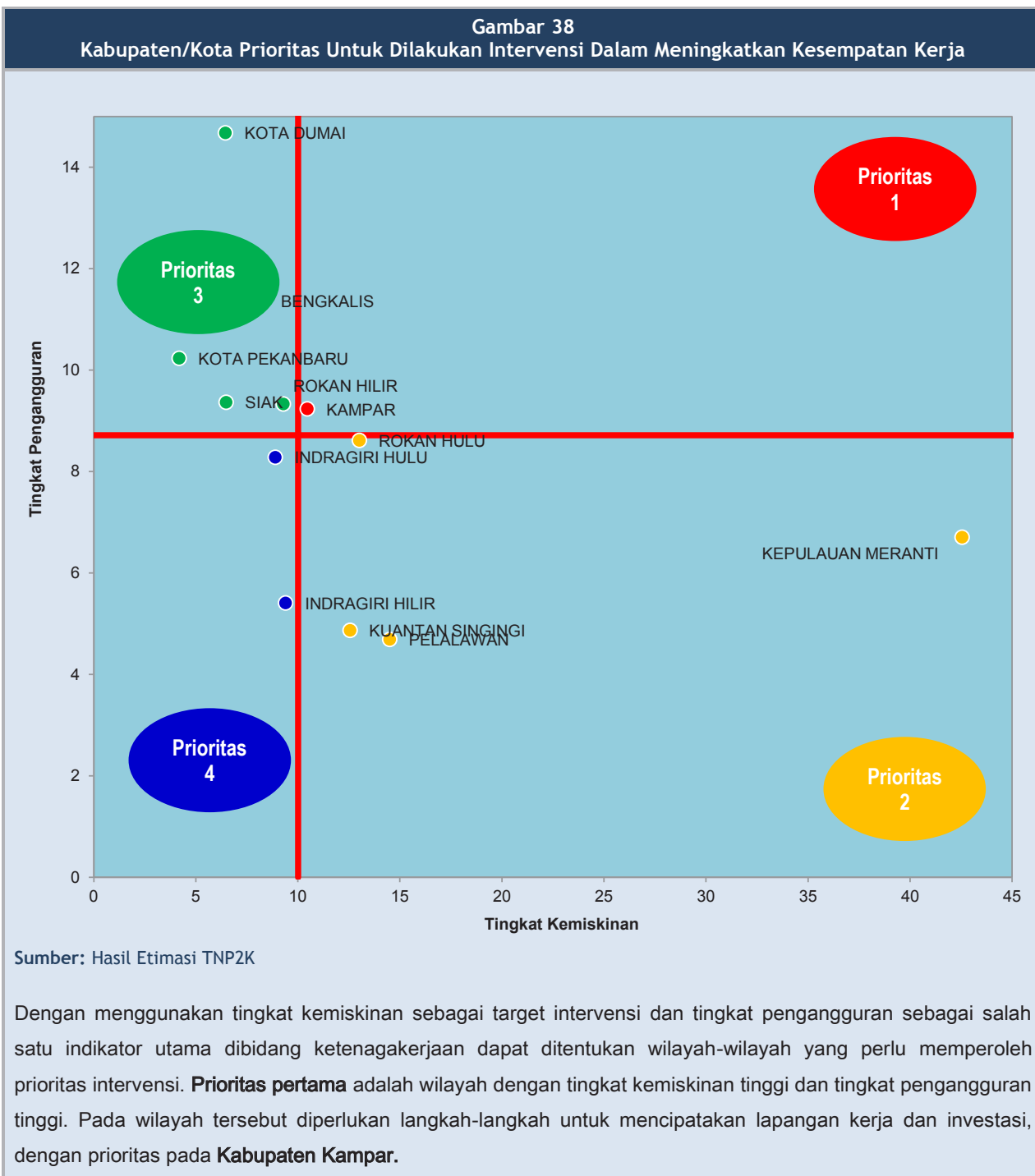
PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

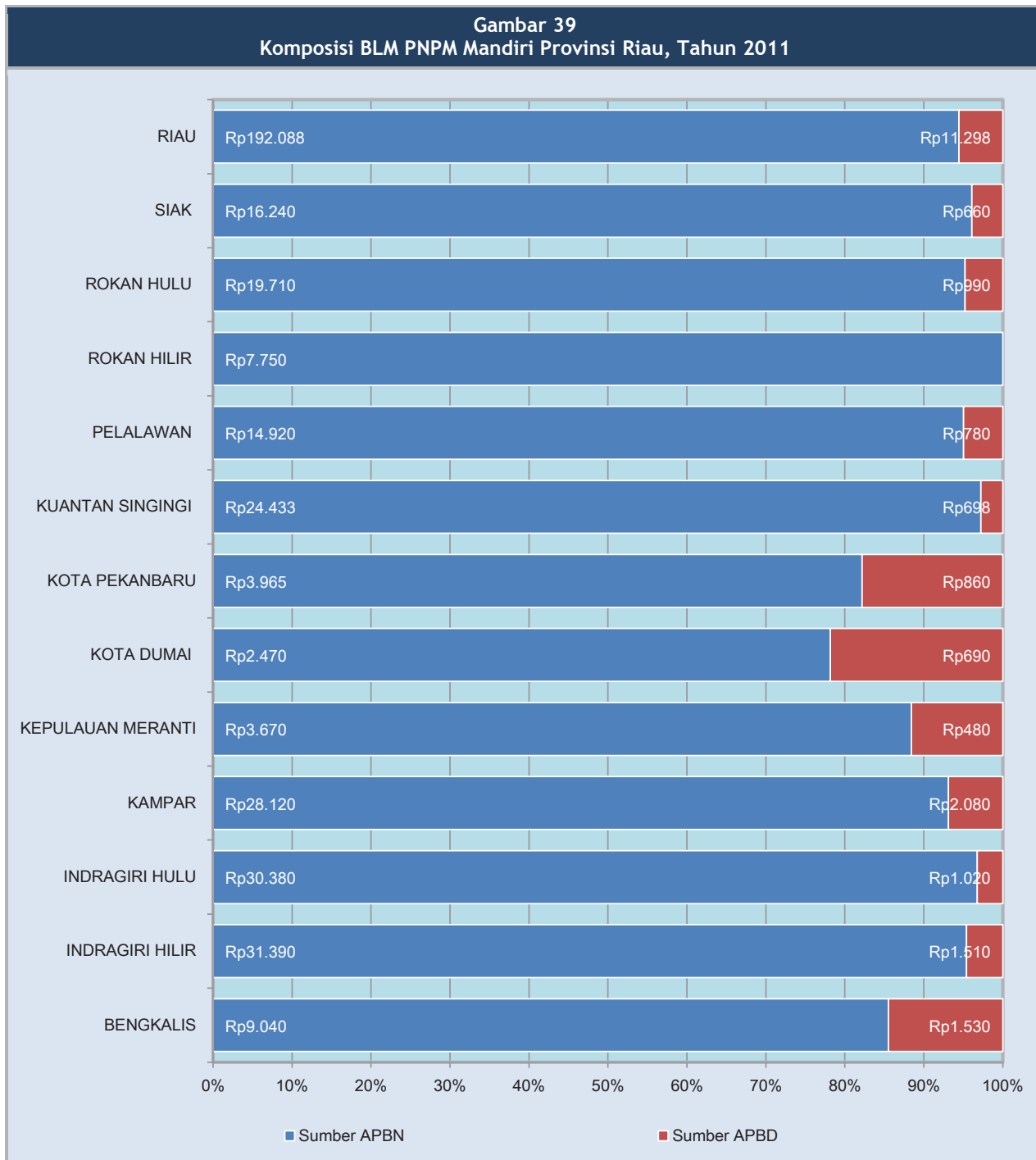


BIDANG-BIDANG PRIORITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel 11
Rekapitulasi Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengang-guran
ROKAN HULU	1	2	1	1	2	1	1	1	2
KUANTAN SINGINGI	1	2	2	1	2	1	1	1	2
PELALAWAN	1	1	2	1	2	2	1	1	2
KAMPAR	2	2	2	1	1	2	1	2	1
KEPULAUAN MERANTI	2	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	2
INDRAGIRI HILIR	3	4	3	3	3	3	3	3	4
ROKAN HILIR	3	4	4	3	3	3	4	3	3
BENGGALIS	4	4	3	3	3	4	4	3	3
INDRAGIRI HULU	3	4	4	3	4	4	3	3	4
KOTA DUMAI	4	3	3	4	4	4	4	4	3
KOTA PEKANBARU	4	3	4	3	4	4	4	4	3
SIAK	4	4	4	4	3	4	4	4	3

Sumber: Ringkasan Hasil Etimasi TNP2K



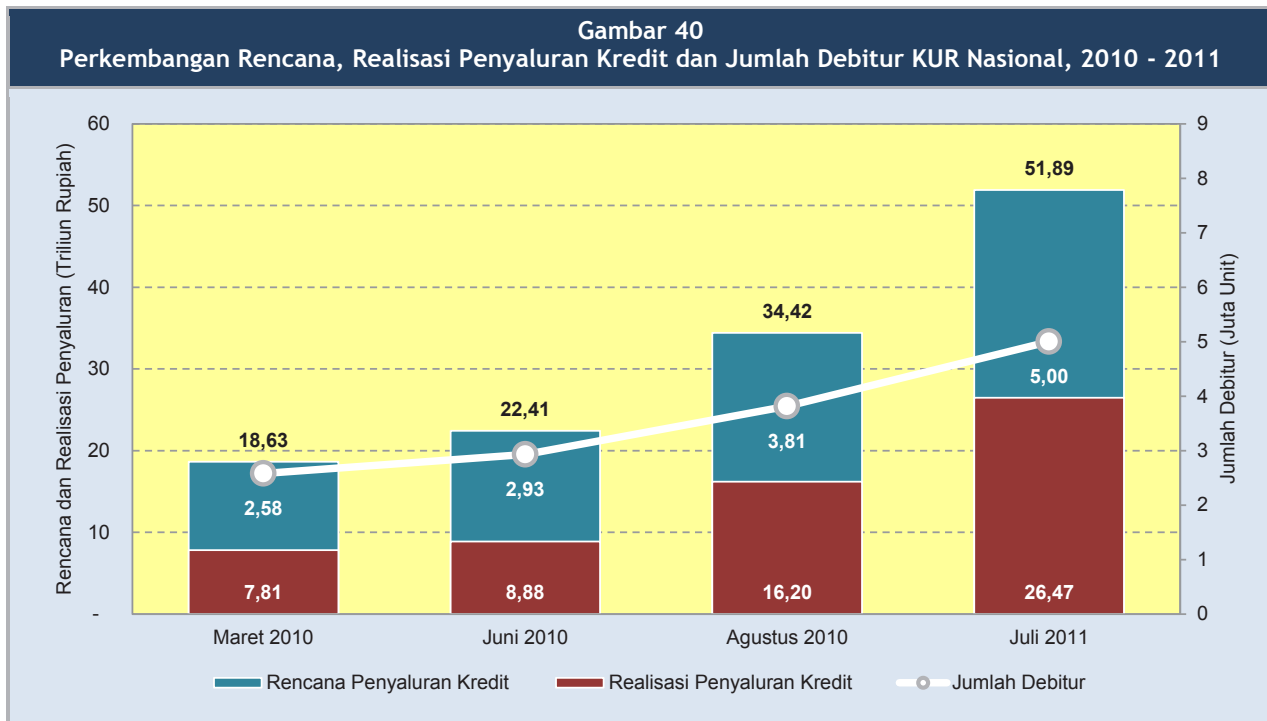
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

Tabel 12.
Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), Tahun 2011

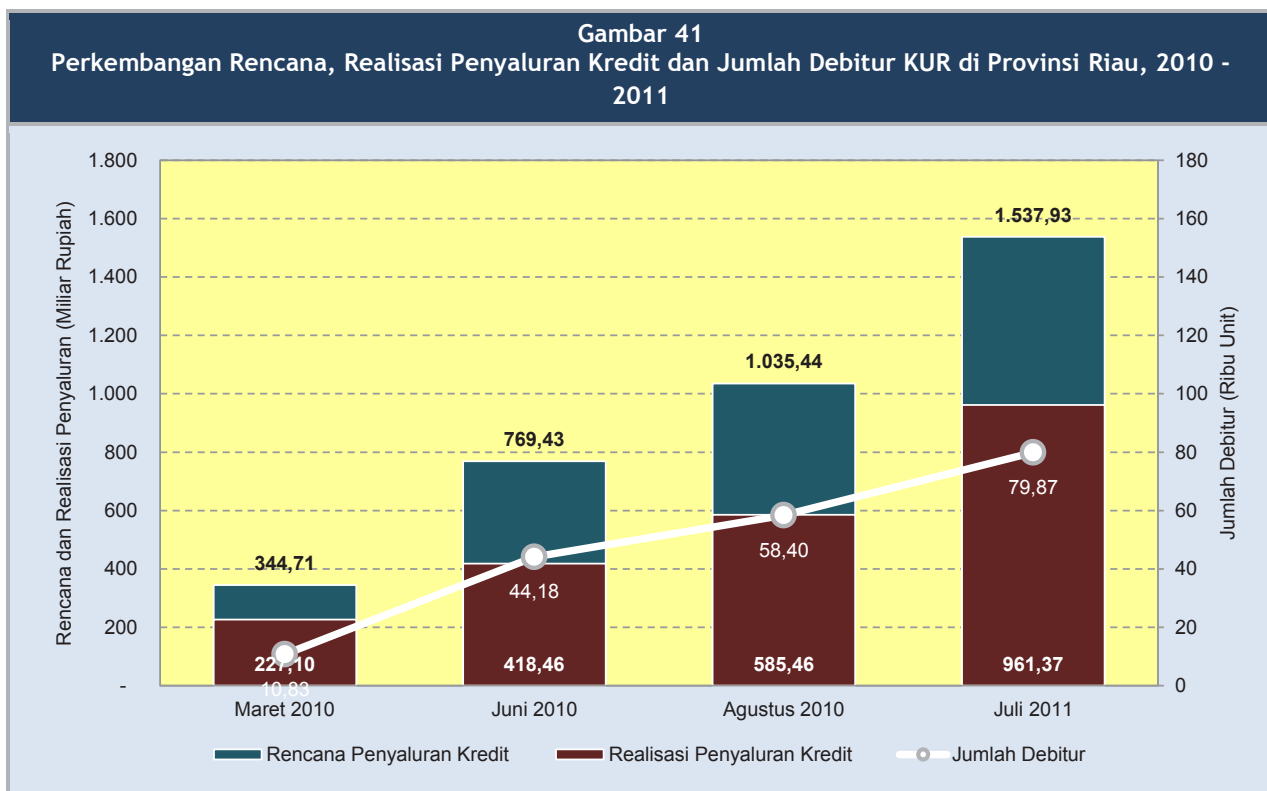
Daerah	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	PNPM RIS	Total Alokasi BLM	Sumber APBN	Sumber APBD	Jumlah Kecamatan
	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Kec.
BENGKALIS	4.650	2.420	3.500	10.570	9.040	1.530	8
INDRAGIRI HILIR	7.050	600	25.250	32.900	31.390	1.510	20
INDRAGIRI HULU	5.100	-	26.300	31.400	30.380	1.020	14
KAMPAR	10.400	-	19.800	30.200	28.120	2.080	21
KEPULAUAN MERANTI	2.400	-	1.750	4.150	3.670	480	5
KOTA DUMAI	-	3.160	-	3.160	2.470	690	5
KOTA PEKANBARU	-	4.825	-	4.825	3.965	860	12
KUANTAN SINGINGI	3.300	831	21.000	25.131	24.433	698	12
PELALAWAN	3.900	-	11.800	15.700	14.920	780	12
ROKAN HILIR	-	-	7.750	7.750	7.750	-	6
ROKAN HULU	4.950	-	15.750	20.700	19.710	990	16
SIAK	3.300	-	13.600	16.900	16.240	660	14
RIAU	45.050	11.836	146.500	203.386	192.088	11.298	145

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

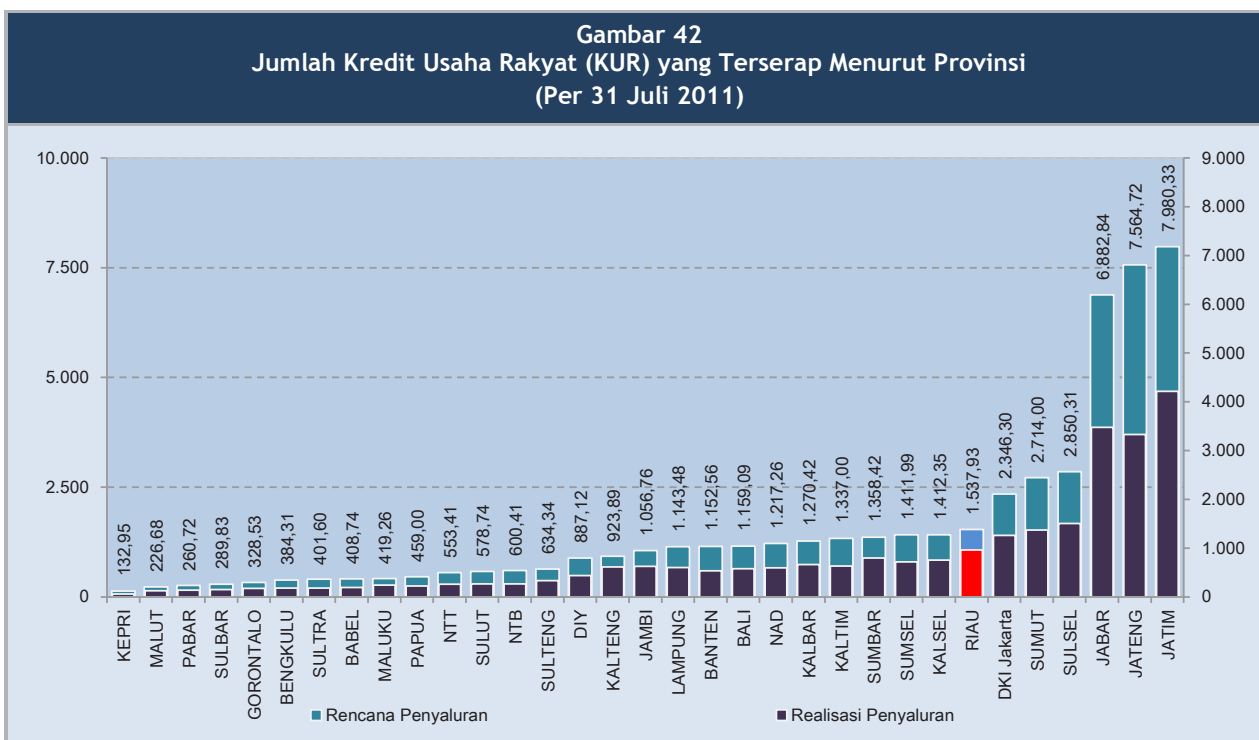


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

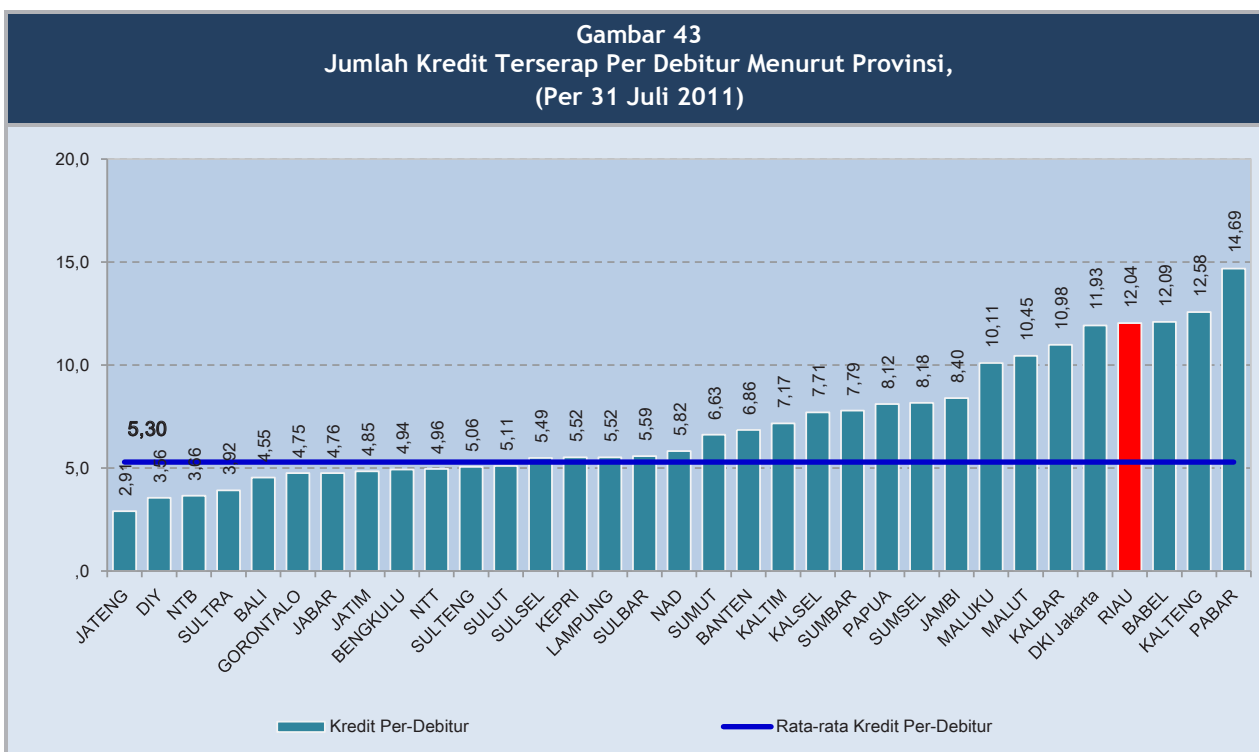


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

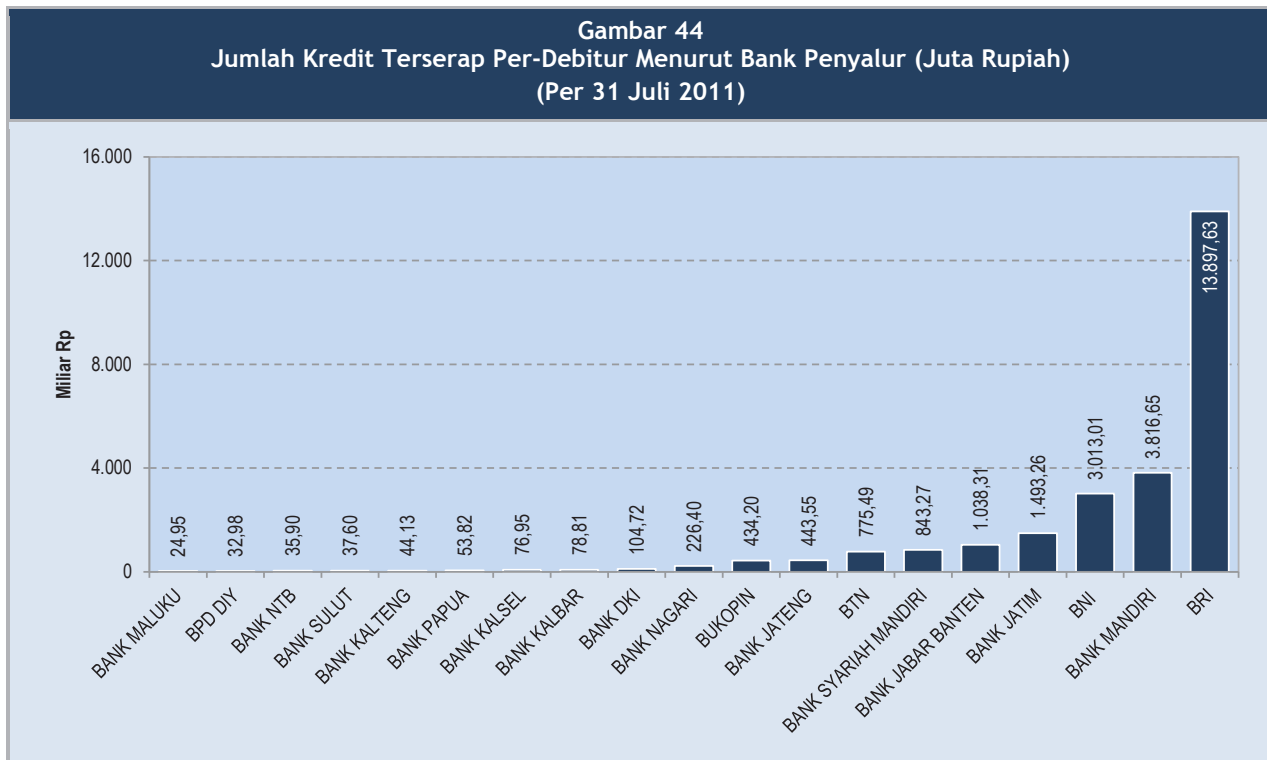


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

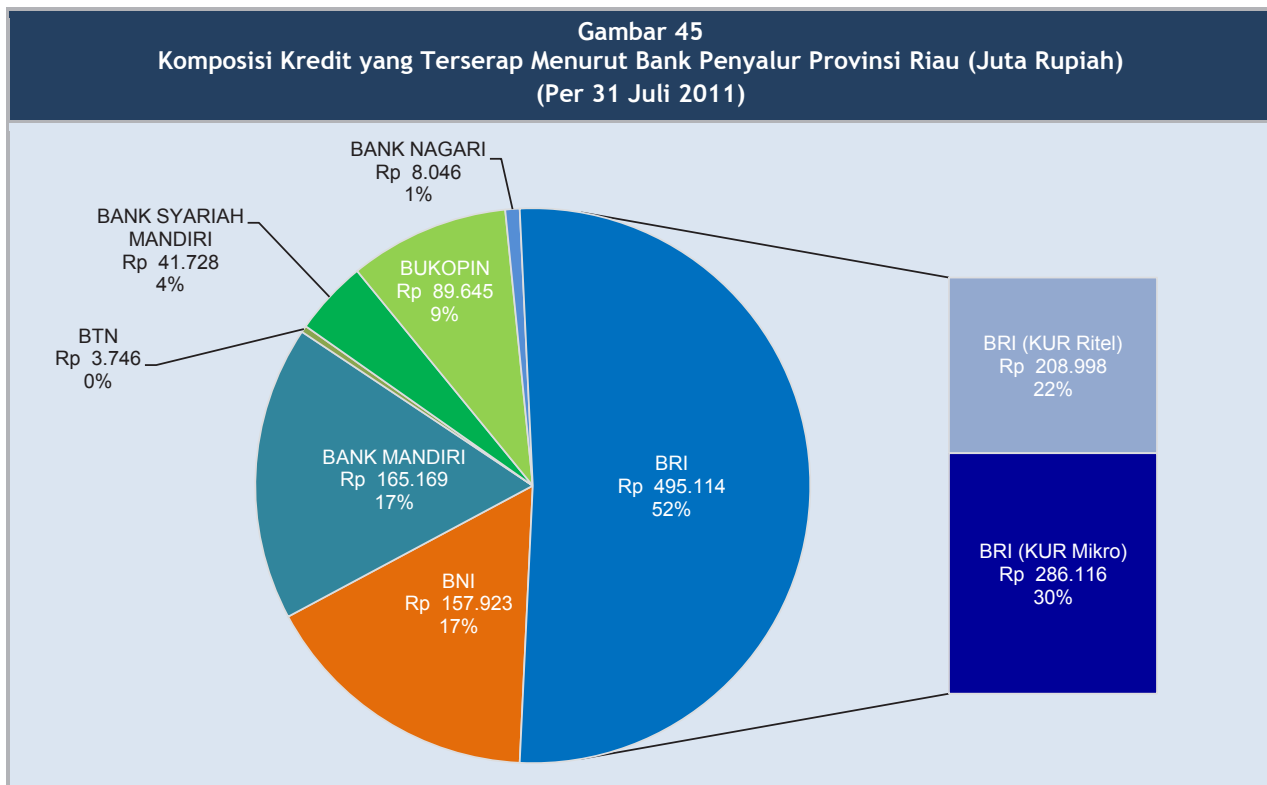


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

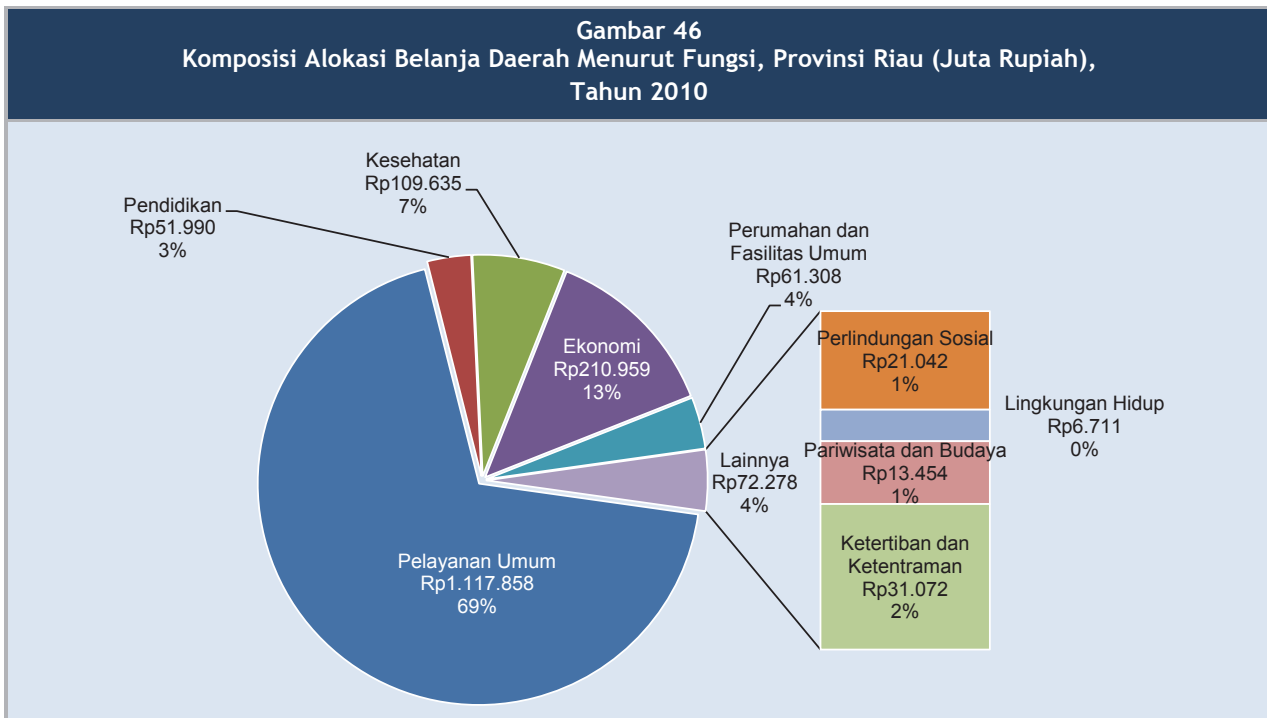


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

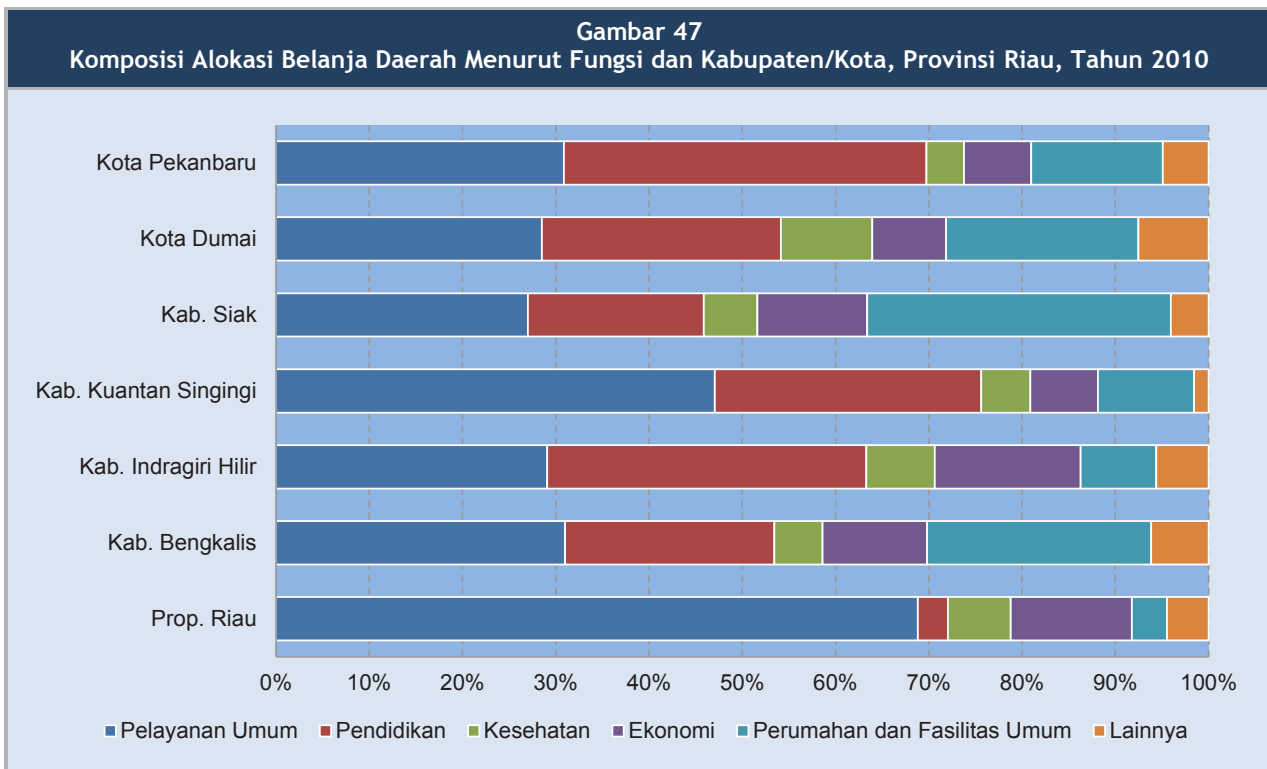


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010

Keterangan: Komposisi Alokasi Belanja Daerah merupakan angka Anggaran Tahun 2010 (Bukan nilai realisasi).